

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA *LI'AN* DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)



Oleh:

ABDUL GHONI
NIM: 21790215616

**PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H /2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembar Pengesahan

Nama : Abdul Ghoni
Nomor Induk Mahasiswa : 21790215616
Gelar Akademik : M.H (Magister Hukum)
Judul : Putusnya Perkawinan Karena *Li'an* Dalam
Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Perspektif Maqashid Syari'ah

Tim Penguji : Dr. H. Zailani, M.Ag
Penguji I (Ketua)

Dr. H. Masrun, Lc, MA
Penguji II (Sekretaris)

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
Penguji III

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian/ Pengesahan 26/7/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul ***"PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH"*** yang di tulis oleh :

Nama : Abdul Ghoni
 Nim : 21790215616
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 Juli 2021.

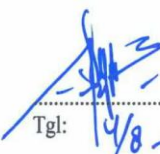
Penguji I,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

Tgl: 
 10/8/21

Penguji II

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001

Tgl: 
 14/8-21

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul ***"PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH"*** yang di tulis oleh Sdr. :

Nama : Abdul Ghoni
 Nim : 21790215616
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 Juli 2021.

Pembimbing I,

Dr. Zulkayandri, M.Ag
 NIP. 197101051995031002


 Tgl: 03-08-2021

Pembimbing II

Dr. Azni, M.Ag
 NIP. 197010102007011051


 Tgl: 3/8/2021

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **"PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH"** yang di tulis oleh :


Nama	: Abdul Ghoni
Nim	: 21790215616
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Januari 2021
Pembimbing I,


Dr. Zulkayandri, M.Ag
NIP. 197101051995031002

Pekanbaru, 12 Juni 2021
Pembimbing II,


Dr. Azni, M.Ag
NIP. 197010102007011051

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. ZULKAYANDRI, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Abdul Ghoni

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Abdul Ghoni**
Nim : 21790215616
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Putusnya Perkawinan Karena *Li'an* Dalam Pasal 162
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid
Syari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Januari 2021
Pembimbing I

Dr. Zulkayandri, M.Ag
NIP. 197101051995031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. AZNI, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Abdul Ghoni

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Abdul Ghoni**
Nim : 21790215616
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Putusnya Perkawinan Karena *Li'an* Dalam Pasal 162
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid
Syari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Juni 2021
Pembimbing II

Dr. Azni, M.Ag
NIP. 197010102007011051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Abdul Ghoni
 NIM : 21790215616
 Tempat/Tanggal Lahir : Gema / 22 November 1989
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **"Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Juni 2021



[Signature]
Abdul Ghoni
 21790215616



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan, sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI’AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”**

Shalawat beserta salam tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa ummat manusia dari kegelapan kehidupan manusia sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari kehidupan jahiliyyah sampai kepada kehidupan yang berlandaskan pada tuntunan al-Qur’an dan Sunnahnya.

Tesis ini merupakan persyaratan bagi mahasiswa pascasarjana untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Dalam upaya penyelesaian penelitian Tesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan baik dalam bentuk tenaga maupun pikiran. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan Jazakumullah Khair kepada yang terhormat :

1. Yang tercinta Ibunda Jamaliss dan Ayahanda Buyung yang telah memberikan semangat, do’a dan dukungan dengan tulus dan ikhlas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zailani, M. Ag selaku ketua prodi studi hukum keluarga S2 yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan terbaik selama perkuliahan
5. Bapak Dr. Zulkayandri, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku pembimbing II dalam pembuatan tesis ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff keluarga besar prodi Hukum Keluarga pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan motivasi
7. Bapak H. Israwardi beserta Ibu Hj. Desmiarti selaku orang tua angkat di Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan membantu sepenuhnya biaya perkuliahan pascasarjana ini
8. Yusy Erni, S.Ag isteri tercinta penulis yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat, motivasi serta dukungan dalam upaya menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan itu baik didunia maupun di

akhirat nanti. *Aamiin yarobbal 'Alamin*

Pekanbaru, 26 Juli 2021
Penulis,

ABDUL GHONI
NIM: 21790215616

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	12
C. Pemasalahan	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Pembatasan Masalah	15
3. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. <i>Li'an</i>	19
1. Pengertian <i>Li'an</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Li'an</i>	23
3. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Li'an</i>	32
4. Rukun dan Syarat <i>Li'an</i>	38
5. Tata Cara Pelaksanaan <i>Li'an</i>	41
6. Akibat Hukum <i>Li'an</i>	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengingkaran Terhadap <i>Li'an</i>	49
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	50
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)	50
2. Kodifikasi Hukum Islam	51
3. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) .	57
4. Proses Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	62
5. Sumber Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	66
6. Sistematika Materi Kompilasi Hukum Islam (KHI)	72
C. Pustusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	77
D. <i>Li'an</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	84
1. Pasal-Pasal yang Berkaitan dengan <i>Li'an</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	84
2. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukum <i>Li'an</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	86
E. Maqashid Syari'ah	91
1. Pengertian Maqashid Syari'ah	91
2. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	93
3. Maqashid Syari'ah dalam Perkawinan.....	95

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pengertian Metodologi Penelitian.....	99
B. Urgensi Metodologi Penelitian	101
C. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	102
D. Jenis Penelitian.....	105
E. Sumber Data Penelitian.....	112
F. Teknik Pengumpulan Data.....	113
G. Teknik Analisis Data.....	114

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV AKTUALISASI PASAL 162 SEBAGAI AKIBAT HUKUM

LI'AN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Perlindungan Terhadap Suami	11
B. Perlindungan Terhadap Isteri	118
C. Perlindungan Terhadap Anak.....	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Abdul Ghoni, (2021) : Putusnya Perkawinan Karena *Li'an* Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian terhadap tujuan pemberlakuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara putusnya perkawinan karena sebab *li'an*. Sehingga pasal 162 dianggap tidak relevan dengan zamanya. Padahal pasal tersebut adalah merupakan tujuan akhir dari proses *li'an*. Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sangat penting karena dalam konteks maqashid syari'ah aktualisasi pasal 162 tersebut adalah untuk melindungi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara *li'an* yaitu suami, isteri dan anak-anak. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer yaitu buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan *li'an*. Sementara sumber data sekunder diambil dari buku-buku lainnya yang sekiranya mendukung dan berkaitan pembahasan tersebut. Sedangkan proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, yaitu melalui tiga tahap antara lain penyajian data, verifikasi dan reduksi. Teknik analisis data dilakukan secara konten analisis yaitu terhadap isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 162.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan sesuatu yang fundamental dari pensyari'atan hukum *li'an* itu sendiri, sehingga perlu adanya aturan tambahan lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penegasan akan pemberlakuannya, karena ia mestilah berlaku bilamana sempurna terjadinya *li'an* antara suami dan isteri. Adapun pasal 162 tersebut adalah menjelaskan tentang akibat hukum dari *li'an* itu sendiri antara lain putusnya perkawinan antara suami dan isteri untuk selamanya, nasab anak dinisbatkan kepada ibunya dan suami terbebas dari nafkah.

Dalam perspektif maqashid syari'ah aktualisasi pasal 162 itu sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan yaitu terpeliharanya keturunan atau nasab dengan sebaik-baiknya. Perlindungan yang dimaksudkan adalah kehormatan dan keadilan serta hak-hak yang berkaitan dengan perkara *li'an* yaitu suami, isteri dan anak-anak.



ملخص

عبد الغني، (2021): فسخ الزواج بسبب اللعان في المادة 162 من مصنف الشريعة الإسلامية من منظور مقاصد الشريعة

خلفية هذا البحث عدم الاهتمام بالغرض من تطبيق المادة 162 من مصنف الشريعة الإسلامية في حالة فسخ الزواج بسبب اللعان. فالمادة 162 تعتبر غير ذات الصلة بعصرها. وهذه المادة هي الهدف النهائي لعملية اللعان. تعتبر المادة 162 من مصنف الشريعة الإسلامية مهمة للغاية لأنها في سياق مقاصد الشريعة، فإن تحقيق المادة 162 هو حماية الأطراف ذات الصلة بأمر اللعان، أي الزوج والزوجة والأولاد.

هذا البحث نوعه بحث مكتبي بمصادر البيانات الأولية، وهي كتاب مصنف الشريعة الإسلامية وكتب الفقه المتعلقة باللعان. وتم أخذ مصادر البيانات الثانوية من الكتب الأخرى التي تدعم المناقشة وتعلق بها. وتم تنفيذ عملية تحليل البيانات في نفس الوقت مع عملية جمع البيانات، أي من خلال ثلاث مراحل، وهي عرض البيانات والتحقق والتقليل.

من هذا البحث، يمكن ملاحظة أن المادة 162 من مصنف الشريعة الإسلامية هي شيء أساسي لقانون اللعان، لذلك هناك حاجة إلى قواعد إضافية أخرى في مصنف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتأكيد تنفيذه، لأنها يجب أن تطبق إذا يكون اللعان تاماً بين الزوج والزوجة.

وتوضح المادة 162 العقوبة القانونية للعان، وهي فسخ الزواج بين الزوج والزوجة إلى الأبد، وينسب نسب الولد إلى الأم والزوج يُتخلع من النفقة. من منظور مقاصد الشريعة، تحقيق المادة 162 يهدف إلى توفير الحماية من أجل تحقيق المصلحة في الزواج، أي اختيار النسل أو النسب بقدر الإمكان. والحماية هي الشرف والعدل والحقوق المتعلقة بأمر اللعان، أي الزوج والزوجة والأولاد.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Abdul Ghoni, (2021) : The Dissolution of Marriage because of Li'an in Article 162 of the Compilation of Islamic Law (KHI) from the Perspective of Maqashid Shari'ah

This research is based on the lack of attention to the purpose of applying Article 162 of the Compilation of Islamic Law (KHI) in the case of dissolution because of *li'an*. Therefore, article 162 is considered irrelevant to its era. In fact, the article is the ultimate goal of the *li'an* process. Article 162 of the Compilation of Islamic Law (KHI) is very important because in the context of *maqashid shari'ah*, the actualization of article 162 is to protect parties related to *li'an* cases, namely husband, wife and children. This research is a type of library research with primary data sources, namely the book Compilation of Islamic Law (KHI) and fiqh books related to the *li'an*. Meanwhile, secondary data sources are taken from other books that support and relate to the discussion. While the data analysis process is carried out simultaneously with the data collection process, namely through three stages, including data presentation, verification and reduction. From this research, it can be identified that article 162 of the Compilation of Islamic Law (KHI) is fundamental to the *li'an* law, so there is a need for other additional rules in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the confirmation of its implementation, because it must apply when the perfect *li'an* between husband and wife. Article 162 explains the legal consequences of the *li'an*, including the termination of the marriage between husband and wife forever, the lineage of the child is attributed to the mother and the husband is free from maintenance. In the perspective of *maqashid shari'ah*, the actualization of article 162 aims to provide protection in order to realize benefits in marriage, namely the selection of offspring or lineage as well as possible. The protection is honor and justice as well as rights related to *li'an* cases, namely husband, wife and children.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam literatur fiqih dikenal dengan istilah *nikah* atau *zawwaj* yang berarti bergabung, bercampur atau akad.¹ Dengan adanya perkawinan tersebut menimbulkan kebolehan bercampur, bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan serta menyebabkan timbulnya secara timbal balik hak-hak dan kewajiban antara keduanya.

Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan untuk memelihara kehormatan dan keturunan², serta sebagai pelindung diri dari perbuatan zina. Memelihara keturunan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan nasab agar jelas baik dalam aturan hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.³ Ikatan perkawinan juga menimbulkan adanya hubungan keluarga, baik keluarga kecil yang didalamnya terdapat suami, isteri dan anak-anak serta keluarga besar yaitu bapak, ibu dan bapak ibu mertua.⁴

Islam memandang keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan saja sebagai *'ubudiyah* dan kebutuhan biologis semata, akan tetapi keluarga merupakan dasar kehidupan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. ke- 3, hlm. 36

² Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqih, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta : Hamzah, 2019), cet. ke-1, hlm. 216

³ Kosim, *Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2019), cet. ke-1, hlm. 17

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pranamedia Group, 2016), cet. ke-1, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialdantegaknya tugas-tugas kekhilafaan (kepemimpinan) manusia diatas bumi dalam rangka pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT yang darinya lahirlah fungsi-fungsi dan amanah yang harus diemban oleh manusia.⁵

Oleh karenanya dalam kehidupan keluarga suami dan isteri dituntut untuk menjaga hubungan keluarganya dengan baik, menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghargai serta menghormati antara satu dengan yang lainnya, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkeluarga dengan cara menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan hubungan baik secara lahiriyah maupun batiniyah serta melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing (suami-isteri).⁶

Segala sesuatu dan usaha yang menyebabkan rusaknya bahkan sampai putusnya perkawinan dibenci dalam Islam. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan suami-isteri dapat hidup dengan damai dan tenteram, dinamika kehidupan keluarga terus berjalan seiring dengan munculnya berbagai persoalan yang bisa membuat rusaknya bahkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Diantara banyak persoalan keluarga yang bisa membuat rusaknya dan bahkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri adalah sumpah laknat suami dan isteri yang disebut dengan *li'an*.

Li'an adalah merupakan sumpah seorang suami yang menuduh isterinya berzina dan atau mengingkari anak yang lahir dari isterinya akan tetapi suami tidak mampu menghadirkan atau mendatangkan empat orang

⁵*Ibid*, hlm. 7

⁶Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), cet. ke- 1, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi dan tuduhan tersebut tidak dapat diterima oleh isteri, sehingga ia menolak tuduhan suaminya dengan bersumpah bahwa apa yang dituduhkan suaminya adalah dusta. Persoalan ini disebut dengan *li'an*.⁷

Li'an merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri melakukan perbuatan zina dan kemudian menjadi alasan suami dalam menolak anak yang dikandung atau yang lahir dari isteri.⁸ *Li'an* juga disebut dengan persaksian yang diiringi dengan sumpah laknat oleh kedua belah pihak suami dan isteri yang dilakukan di depan sidang pengadilan.⁹

Para imam mazhab berbeda pendapat dalam mengartikan *li'an*, antara lain yaitu:

- 1) Imam Hanafi (80-150 H) dan Hambali (164-241 H) berpendapat bahwa *li'an* merupakan kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai laknat Allah dari pihak suami dan kemurkaan Allah dari pihak isteri¹⁰
- 2) Imam Maliki (93-179 H) berpendapat bahwa *li'an* merupakan sumpah seorang suami muslim yang melihat isterinya berzina dan tidak mengakui anak yang terdapat didalam kandungan isterinya sebagai anaknya lalu isteri membantah semua tuduhannya tersebut¹¹

⁷Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 19990), cet. ke-1, hlm. 97

⁸Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), cet.ke-1, hlm. 113

⁹Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam Bab 6*, alih bahasa oleh Eko Haryanto Abu Ziyad, (Jakarta : Islam House, 2012), cet. ke-1, hlm. 64

¹⁰ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab : Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari*, alih bahasa oleh Ibnu Alwi Bafaqih, (Jakarta : Penerbit Cahaya, 2007), cet.ke-1, hlm. 606

¹¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Imam Syafi'i (150-204 H) berpendapat bahwa *li'an* merupakan kata-kata jelas yang dijadikan sebagai dalil untuk menuduh zina orang yang telah mengotori ranjangnya serta orang yang telah berbuat hina kepadanya atau untuk menafikan anaknya¹²
- 4) Sementara itu Ibnu Qayyim (691-751 H) berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah dan kesaksian.¹³

Syiekh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa persoalan *li'an* adalah masalah seorang muslim yang menemukan isterinya sedang berbuat zina dengan laki-laki lain, sementara ia tidak mempunyai empat orang saksi yang bersaksi selain dirinya. Apabila ia membicarakannya maka ia dianggap menuduh berzina (*qadzaf*) dan dikenakan hukuman had didera sebanyak delapan puluh kali, karena dia tergolong *qadzaf*, dan apabila ia diam maka ia diam dalam keadaan sakit hati, maka disinilah Allah SWT memberikan jalan dengan menurunkan ayat tentang *li'an* surat *an-Nur* ayat 6 sampai 9.¹⁴

Berdasarkan dari berbagai pendapat ulama tersebut bahwa *li'an* merupakan sumpah dan kesaksian, yang bermula dari tuduhan seorang suami terhadap isterinya dengan tuduhan melakukan perbuatan keji yaitu zina, atau dengan melakukan penolakan atau pengingkaran terhadap anak yang dikandung atau yang lahir dari isterinya, agar terhindar dari hukuman hadd *qadzaf* maka ia melakukan *li'an*.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2014), cet.ke-2, hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Li'an dilatar belakangi oleh perbuatan zina yang dituduhkan kepada salah satu pasangan dalam perkawinan.¹⁵ Sementara itu perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang sangat keji dan buruk, sehingga tuduhan berzina adalah merupakan perbuatan yang tidak main-main, dimana seseorang tidak bisa menuduh siapapun berbuat zina tanpa ada saksi. Hukum Islam menjelaskan bahwa saksi dalam perkara tuduhan zina adalah empat orang saksi. Keempat saksi dimaksudkan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, dan bila tidak dapat menghadirkan empat saksi sebagaimana dimaksud maka seseorang dianggap berdusta serta diancam dengan hukuman had.¹⁶

Bagi suami isteri, satu-satunya cara yang harus ditempuh dalam perkara tuduh menuduh adalah dengan ber*li'an*. Perkara ini bermula pada bulan sya'ban tahun 9 hijriyah, seorang sahabat Nabi Saw bernama *Hilal bin Umayya* telah menuduh isterinya berbuat zina dengan seorang laki-laki yang bernama *Syarik bin Samha*, akan tetapi *Hilal* tidak mampu mendatangkan saksi selain dari dirinya, maka Rasulullah Saw perintahkan untuk ber*li'an*.¹⁷

Pensyari'atan hukum *li'an* memberikan solusi atas permasalahan antara suami isteri dalam perkara tuduh menuduh zina.¹⁸ Sehingga *li'an* menjadi hukum tersendiri dalam hukum keluarga Islam (fiqih) yang tidak hanya menjelaskan tentang aturan-aturan hukumnya akan tetapi yang paling

¹⁵ Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), cet.ke-1, hlm. 112

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fiqih Munakahat, *op.cit*, hlm. 105

¹⁸ Fiqih, *op.cit*, hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok adalah perkara yang berkaitan dengan akibat hukum dari pensyari'atan *li'an* itu sendiri. Akibat hukum dari *li'an* berkaitan dengan keberlangsungan dan keutuhan hubungan suami isteri dan keturunan untuk selama-lamanya. Selain dari itu pensyari'atan *li'an* juga mengatur tentang perlindungan terhadap suami dan isteri serta anak-anak yang didalamnya terdapat status atau kedudukan anak setelah terjadinya *li'an* dan serta kedudukan tentang warisan.

Dengan demikian bahwa *li'an* menjadi salah satu perkara yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam (fiqih) terlebih dizaman yang semakin maju dan berkembang, serba canggih dengan kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan tersebut, berbagai persoalan terjadi dalam rumah tangga, seperti terjadinya perceraian, pada tahun 2019 berdasarkan data Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI sudah terjadi sebanyak 604.997 permohonan perceraian, 70% diantaranya dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Kasus *li'an* yang diadili di Pengadilan Agama pada umumnya dilatar belakangi oleh perselingkuhan dan perzinahan. Diantaranya adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan Nomor 1684/Pdt.G/2018/PA.Lmg dalam perkara perzinahan dan penyangkalan anak oleh pemohon yang bernama Khoirul Affan, S.Pd (36 tahun) terhadap termohon Nurlaila Hayati, S.Pd (40 tahun). Adapun duduk perkaranya adalah bahwa pemohon pernah mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada termohon dan dalam gugatan tersebut pemohon melakukan sumpah *li'an* dihadapan sidang pengadilan, sehingga secara syar'i bahwa hubungan suami isteri antara keduanya menjadi putus. Dengan telah terjadinya sumpah *li'an* tersebut pemohon disarankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengajukan permohonan cerai talak dan atau permohonan pengucapan ikrar talak.

Adapun putusan pengadilan agama kabupaten lamongan terhadap perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan, tidak hadir
- 2) Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
- 3) Memberi izin kepada pemohon (penggugat) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (tergugat) didepan sidang pengadilan agama lamongan
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).¹⁹

Selain dari itu, pergaulan bebas pra-nikah juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian *li'an*, seperti dalam kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur Nomor:1595/Pdt.G/2010/PA.Sda antara seorang suami berusia 19 tahun dengan seorang isteri berusia 18 tahun, tiga hari setelah pernikahan isteri selaku termohon melahirkan seorang anak, suami selaku pemohon telah melakukan hubungan suami-isteri (terlarang) sebanyak dua kali dengan isteri (termohon) sebelum pernikahan, namun suami menuduh isterinya melakukan hubungan seksual dengan yang lain dan menyangkal anak yang lahir dari isterinya tersebut bukan anak dari hasil hubungan mereka berdua²⁰.

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²⁰ Fahrurrahman, *Pelaksanaan dan Prosedur Perceraian Li'an*, dalam repository.unpas.ac.id diakses pada Kamis, 13 Agustus 2020 pukul 10.33 WIB, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo melalui majelis hakim yang dipimpin oleh Dra.Hj.Masrukha, MH memutuskan perkara tersebut dengan menjatuhkan talak *bai'in kubro* pemohon terhadap termohon dan Pengadilan mengabulkan permohonan cerai pemohon dan pengingkaran anak dengan *li'an*, sebagai akibat hukum dari *li'an* tersebut majelis hakim memutuskan bahwa anak yang lahir tersebut bukanlah anak dari perkawinan yang sah, sehingga meskipun demikian majelis hakim dalam amar putusanya menghukum pemohon terhadap termohon berupa nafkah *madliyah* dan *mut'ah*. Ini merupakan contoh kasus persoalan *li'an* dipengadilan agama.

Banyak tulisan dan karya ilmiah yang membahas persoalan *li'an* antara lain yaitu yang ditulis oleh Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin (2018) dengan judul Penolakkan Nasab Anak *Li'an* dan *Dhihar* dengan *Ta'liq* (*Analisis Komperatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni*) dalam jurnal ini secara umum menuliskan tentang perkara *li'an* berdasarkan pada hukum-hukum fiqih secara normatif, akan tetapi penegasan pembahasan secara khusus dalam tulisan tersebut terdapat pada analisis komperatif antara Wahbah Zuhaili dan Ibnu Qudamah yang menulis penolakkan Nasab Anak *Li'an* dan *Dhihar* dalam kitabnya.

Sehingga kesimpulan dalam jurnal ini menuliskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara Wahbah Zuhaili dengan Ibnu Qudamah mengenai penolakkan nasab anak dan kehamilan, hanya saja Ibnu Qudamah lebih merincikan dengan menyebutkan batasan usia bagi suami yang meli'an isterinya, yaitu jika suami masih berada pada usia anak-anak atau berada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah 10 tahun maka nasab terlepas dari dirinya. Namun jika suami berada diatas 10 tahun maka wajib hukumnya untuk menerima nasab anak itu.²¹

Sementara itu dalam Jurnal Islam yang ditulis oleh Suryani Dosen FUAD IAIN Bengkulu (2016) dengan judul “*Li’an* Dalam Perspektif Filosofis dan Normatif” tulisan inimenjelaskan bahwa *li’an* secara Filosofis dapat ditinjau kedalam beberapa aspek yaitu aspek ontologis yang membahas tentang pengertian dan ruang lingkup *li’an*, aspek epistemologis yang membahas tentang sebab-sebab terjadinya *li’an*, dan aspek aksiologis yaitu tentang syarat, rukun dan tatacara pelaksanaan *li’an*.

Sedangkan secara normatif *li’an* mengatur tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan *li’an* itu sendiri, waktu mengingkari kandungan, pengingkaran kandungan setelah talak, masa berlakunya hukum *li’an*, menuduh isteri berzina dan mengakui kandungannya, akibat *li’an*, waktu perceraian diwajibkan, perceraian karena *li’an* talak atau *fasakh*, dan hukum menisbatkan anak kepada ibunya.²²

Dari tulisan dalam jurnal tersebut dapat diketahui bahwa keduanya menjelaskan tentang perkara *li’an* berdasarkan pada hukum Fiqih keluarga Islam. dalam perspektif hukum fiqih keluarga Islam perkara *li’an* dibahas dan dijelaskan secara rinci, agar memperoleh maksud dan tujuan hukum yang sebenarnya secara *maqashid syari’ah*. Akan tetapi tulisan tersebut tidak memuat tentang perkara hukum Islam dalam perspektif penerapan hukum perdata Islam di Indonesia.

²¹ Hafidzi Anwar. Musyarrofah Binti. “*Penolakkan Nasab Anak Li’an dan Dhihar dengan Ta’liq (Analisis Komperatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni)*” dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua> diakses pada Minggu, 19 April 2020, pukul 10:41 WIB.

²² Suryani. “*Li’an Dalam Perspektif Filosofis dan Normatif*” dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id> diakses pada Minggu, 19 April 2020, Pukul 11:20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, dalam hukum perdata Islam di Indonesia yang dikodifikasikan dalam sebuah aturan hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan fiqh mazhab Indonesia, karena lahir dari proses ijtihad kolektif (*jama'i*)²³ yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw sebagai landasan utamanya, pembahasan *li'an* dijelaskan dalam buku I tentang perkawinan sebanyak (5) pasal :

- 1) Pasal (125) yaitu berkaitan dengan *li'an* yang menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya
- 2) Pasal (126) yaitu berkaitan dengan penyebab terjadinya *li'an* antara lain terjadinya tuduhan suami atas isteri dengan tuduhan zina dan atau suami mengingkari anak yang terdapat dalam kandungan isterinya sementara isteri menolak semua tuduhan tersebut²⁴
- 3) Pasal (127) yaitu berkaitan dengan tata cara pelaksanaan *li'an* itu sendiri baik oleh pihak suami maupun oleh pihak isteri, dimana keduanya sama-sama mengucapkan sumpah sebanyak empat kali sedangkan sumpah ke lima laknat Allah diatas isteri bila tuduhan suami benar, dan laknat Allah diatas suami bila tuduhannya tidak benar²⁵
- 4) Pasal (128) yaitu berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan *li'an* yaitu dihadapan sidang pengadilan agama atau didepan hakim.

²³ Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia, Fiqih dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), cet.ke-1, hlm. 77

²⁴ Tim Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1, hlm. 258

²⁵ Tim Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), cet.ke-3, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pasal (162) yaitu pasal yang ketentuannya berkaitan dengan akibat hukum yang timbul setelah sempurna terjadinya *li'an* antara suami dan isteri

Diantara pasal-pasal yang berkaitan tentang *li'an*, pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hal yang fundamental dari semua aturan *li'anyang* disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu berkaitan dengan akibat hukum yang akan berlaku bagi kedua belah pihak setelah terjadinya *li'an*.

Adapun pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut: *"Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinisbatkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberikan nafkah"*. Pasal 162 tersebut memiliki tiga ketentuan sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan antar suami dan isteri yang berlaku untuk selama-lamanya. Bahwa suami dan isteri tidak boleh rujuk atau kembali dalam ikatan perkawinan untuk selama-lamanya
2. Anak yang dikandung oleh isteri nasabnya di nisbatkan kepada ibunya, karena suami telah menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anaknya
3. Bahwa suami tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri maupun anaknya setelah sepenuhnya terjadi proses *li'an*.

Akibat hukum ini diberlakukan dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi suami dan isteri dalam menghadapi persoalan *li'an*, karena didalam perspektif maqashid syari'ah, setiap hukum mengandung masalah yang ingin dicapai. Masalah yang dimaksud adalah kebaikan dan manfaat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta terhindar dari segala mafsadah (kerusakan). Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam pemberlakuan pasal 162 tersebut adalah berkaitan dengan suami, isteri dan anak-anak. Sehingga perkara *li'an* yang telah diputuskan oleh pengadilan agama mestilah membuat amar putusan yang memerintahkan untuk pemberlakuan akibat hukumnya, agar supaya maqashid syari'ah dari pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa tercapai sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis ingin melakukan sebuah penelitian tentang ***“PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI'AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH”***

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna beberapa kata dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menguraikan beberapa istilah penting, antara lain:

1. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan terdiri dari dua kata yaitu putus dan perkawinan. Kata putus diartikan sebagai tidak berhubungan lagi karena terpotong dan sebagainya, baik dalam arti sebenarnya seperti tali, kawat dan sebagainya maupun dalam arti kiasan seperti tentang pertalian persahabatan, perhubungan lalu lintas dan sebagainya, atau diartikan juga dengan habis, selesai, berakhir dan sebagainya.²⁶

²⁶ Hoertomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), cet. ke-1, hlm. 394

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu kata perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin artinya perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan kata yaitu nikah. Secara bahasa nikah artinya bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Putusnya perkawinan yang dimaksud dalam judul adalah merupakan istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjelaskan perkara yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan suami isteri.

2. *Li'an*

Kata *li'an* berasal dari kata *al-La'nu* yang berarti ucapan seorang suami, ucapan yang dimaksud adalah ucapan sumpah yang berarti pemisahan antara suami dan isteri untuk selama-lamanya.

Ucapan itu adalah sebagai berikut “aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar-benar melihat isteriku berzina” ucapan itu hendaklah diulang sebanyak empat kali, kemudian adapun ucapan yang kelima dengan kalimat “Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku berdusta atas tuduhanku ini”.

3. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kumpulan hukum Islam dibidang muamalah yang berlaku dalam yuridiksi peradilan agama bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku yaitu : Buku I Tentang Perkawinan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku II Tentang Hukum Kewarisan dan Buku III Tentang Hukum Perwakafan.²⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk dari hukum Islam (Fiqih) yang di susun kedalam bentuk undang-undang, sehingga bisa diberlakukan dalam suatu negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama halnya dengan undang-undang, karakteristiknya adalah singkat, padat dan tidak multi tafsir serta tidak memuat dalil-dalil didalamnya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan *li'an* dalam kasus *qadzaf* sebenarnya sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, seperti misalnya dalam kasus *Hilal bin Umayyah* yang mendapati isterinya sedang berzina, dia melihat dengan matanya, dan mendengarkan dengan telinganya bahwa kejadian itu benar-benar dia saksikan, kemudian dia menghadap Rasulullah SAW mengadukan persoalan tersebut, karena *Hilal* tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka dia melakukan sumpah *li'an* atas kejadian tersebut²⁸.

Perkara *li'an* merupakan problem yang sering dihadapi oleh suami (laki-laki) yang menjadi sebuah dilema baginya, jika suami melihat isterinya berzina lalu melaporkan pada hakim maka dia harus berkewajiban mendatangkan empat orang saksi, jika tidak bisa

²⁷ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar baru van Hoeve, 2005), jilid ke-4, hlm. 140

²⁸ Muhammad Ali al-Hasan, *Tafsir Surat an-Nur*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), cet.ke-2, hlm. 87-88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan empat orang saksi maka dia suami dan isteri dihadapkan dengan sumpah *li'an*.

Setelah putusny perkawinan dengan sebab *li'an* tersebut maka suami isteri akan dihadapkan dengan pemberlakuan akibat hukum yang konsekuensinya ikatan perkawainan putus untuk selama-lamanya sehingga tidak bisa untuk kembali pada ikatan perkawinan tersebut, anak yang dikandung oleh isteri dinisbatkan nasabnya kepada ibunya serta suami terbebas dari kewajiban nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkara ini diatur dalam pasal 162.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka masalah yang ditemukan dalam perkara *li'an* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pandangan terhadap pemberlakuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Relevansi pemberlakuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks kekinian
- c. Aktualisasi pemberlakuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan akibat hukum *li'an* sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah aktualisasi pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) setelah putusny perkawinan yang dikemudian ditinjau dalam perspektif maqashid syari'ah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah aturan *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
- b) Bagaimanakah aktualisasi *li'an* dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan aturan *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Menjelaskan tentang aktualisasi akibat hukum *li'an* dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu dan kajian-kajian syari'ah dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan mampu membuka pemikiran dan pengetahuan kita tentang pentingnya sebuah analisis dari sudut pandang keseimbangan hukum antara teoritis dan praktek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan dan referensi bagi siapa saja atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan hukum perdata Islam agar sejalan dengan hukum Islam (fiqih), kemudian memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya tentang perkara *li'an*.

3. Secara Akademik

Secara akademik penelitian ini berguna bagi syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar magister hukum (MH) pada prodi hukum keluarga pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan langkah-langkah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan
- BAB II** : Kerangka Teoritis, yang terdiri dari : Pengertian *Li'an*, Dasar Hukum *Li'an*, Sebab-Sebab terjadinya *li'an*, Syarat dan Rukun *Li'an*, Akibat hukum *Li'an*, Pengingkaran terhadap *li'an*, Hukum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sumber perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sistematika Materi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (KHI) Pembahasan *Li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqashid Syari'ah

- BAB III** : Metode Penelitian, yang terdiri dari : Pengertian Metodologi Penelitian, Urgensi Metodologi Penelitian, Metode yang digunakan dalam Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisis Data
- BAB IV** : Analisis, Aktualisasi Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Setelah Putusnya Perkawinan karena *Li'an* Perspektif Maqashid Syari'ah: Perlindungan Terhadap Suami, Perlindungan Terhadap Isteri dan Perlindungan Terhadap Anak
- BAB V** : Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. *Li'an*

1. Pengertian *Li'an*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *li'an* diartikan sebagai tuduhan seorang suami dengan mengangkat sumpah bahwa isterinya telah berzina dengan pria lain, dan sebaliknya isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya tidak benar, sehingga masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak empat kali, sedangkan sumpah kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta²⁹.

Pengertian secara bahasa juga terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer kata *li'an* diartikan sebagai tuduhan kepada seseorang atau segolongan yang disertai dengan sumpah sebagai penguat tuduhan tersebut³⁰. Arti kata dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer ini bersifat umum dan multi tafsir, sehingga apa saja yang berkaitan dengan tuduhan yang disertai dengan sumpah maka disebut dengan *li'an* artinya bukan saja dalam hal perkawinan.

Sementara kata *li'an* sebenarnya berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf (ل - ع - ن) menurut Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya dalam *Mu'jam Muqayyis al-Lughah* kata *li'an* memiliki makna

²⁹Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007, cet. Ke-2, hlm. 539

³⁰Peter Salim Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 2002), cet. Ke-3, hlm. 869

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ib'aadin (menjauhkan) dan *ithraadin* (mengusir)³¹. Kata *li'an* juga diartikan sebagai perbuatan saling melaknat, atau menyingkir atau pengusiran dari rahmat Allah (*la'natullah*)³². Selain dari itu juga ditemukan dalam bentuk kata *al-La'nu* yang berarti ucapan seorang suami, ucapan yang dimaksud adalah ucapan sumpah yang berarti pemisahan antara suami dan isteri untuk selama-lamanya. Perkara ini disebut *li'an* karena masing-masing suami dan isteri bersumpah dan bersedia menerima laknat dari Allah jika keduanya atau salah satunya berbohong.³³

Sedangkan term yang berbentuk kata *la'ana* (ل - ع - ن) atau *li'an* (لعن) disebutkan sebanyak 39 kali dalam al-qur'an, antara lain yaitu : dalam *Q.S al-Mukminun* 23:49, *Q.S al-Qashah* 28:42, *Q.S al-Ahzab* 33: 57,61,64, 68, *Q.S al-'Araf* 7: 38,44, *Q.S an-Nisa* 4 : 52,46,47,93,118, *Q.S al-Maidah* 5 : 13,60,64,78, *Q.S al-Baqarah* 2 : 88,159,159,159,89,161, *Q.S at-Taubah* 9 : 68, *Q.S Muhammad* 47 : 23, *Q.S al-Fath* 48 : 6, *Q.S al-Ankabut* 29 : 25, *Q.San-Nuur* 24 : 7, 23, *Q.S ali-Imran* 3 : 61,78, *Q.S Hud* 11 : 18,60,99, *Q.S ar-Ra'd* 13:25, *Q.S al-Mukmin* 40:52, *Q.S Shad* 38:78, *Q.S Isra'* 17:60 dan *QS. Al-Hijr* 15:35.³⁴

³¹ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Muqayyis al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), cet.ke-1, Jilid V, hlm. 252

³² Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrin Abu Bakar, (Semarang : Karya Toha Putra, 1993), cek.ke-3, juz ke-18, hlm. 135

³³ Ifah Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang : Tirta Smart Printing, 2019), cet.ke-1, hlm. 171

³⁴ Muhammad Fu'ad Abd Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazhi al-Qur'anil Kariim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), cet.ke-1, hlm. 649-650

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan arti tersebut terdapat beberapa kata kunci yang menjelaskan secara hakikat dari perbuatan *li'an*, yaitu sebagai berikut³⁵:

1) Sumpah

Kata ini menunjuk bahwa *li'an* adalah merupakan salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlah sebanyak empat kali bahwa ia benar dengan ucapan sumpahnya, dan yang kelima adalah laknat atas dirinya dari Allah jika sumpahnya tidak benar

2) Suami

Kata suami dalam hal ini adalah perkataan suami terhadap isteri, hal ini berarti bahwa *li'an* hanya berlaku antara suami dan isteri dan tidak berlaku diluar lingkungan keduanya

3) Menuduh berzina

Kata ini mengandung makna sesungguhnya sumpah yang dilakukan oleh suami adalah bahwa isterinya telah berbuat zina, baik ia sendiri yang melihat isterinya berbuat zina atau meyakini bahwa anak yang terdapat dalam kandungan isterinya adalah bukan dari anaknya sendiri

4) Suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi

Kata ini mengandung makna yang menunjuk pada tuduhan yang mewajibkan suami mendatangkan empat orang saksi

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Jakarta Putra Grafika, 2009), cet. ke-3, hlm. 288-289



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*, jika ia mampu mendatangkan empat orang saksi maka hal ini bukan termasuk kedalam *li'an*, namun bila suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka dia terancam hukuman *qadzaf*, karena menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan berbuat zina tanpa mendatangkan saksi sebanyak empat orang saksi disebut dengan *qadzaf* yang diancam hukuman had, hal ini Allah jelaskan dalam al-Qur'an surat *an-Nur* ayat 4:



Artinya “orang-orang yang menduduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksiannya untuk selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S an-Nur : 4)³⁶

Apabila suami ingin terlepas dari had *qadzaf* maka berlakulah ketentuan *li'an* bahwa suami harus meli'an isterinya.

Sedangkan secara istilah pengertian *li'an* dapat dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh imam mazhab sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi dan Hambali

³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), cet.ke-1, hlm. 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanafi dan Hambali mendefenisikan *li'an* sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak isteri, yang menempati posisi hukuman *hadd* melakukan penuduhan pada pihak suami.³⁷

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefenisikan bahwa *li'an* adalah merupakan sumpah suami muslim yang akil baligh yang melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh isterinya, atau penolakkannya terhadap kehamilan isterinya darinya.³⁸

3) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefenisikan bahwa *li'an* adalah kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya atau menolak atas anak yang ia kandung.³⁹

2. Dasar Hukum *Li'an*

Li'an merupakan salah satu permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri, permasalahan *li'an* telah dijelaskan dalam sumber-sumber hukum *syara'* sebagai dasar hukumnya, antara lain:

a) Al-Quran

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-10, hlm. 481

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran dalam kajian *Ushul Fiqh* merupakan objek pertama pada penelitian dalam memecahkan permasalahan hukum. Al-Quran menurut bahasa adalah “bacaan” dan menurut istilah *Ushul Fiqh* al-Quran adalah kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa arab serta dianggap ibadah membacanya⁴⁰.

Al-quran sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan manusia secara umum mengandung beberapa ajaran pokok, antara lain⁴¹:

- 1) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan aqidah seperti masalah tauhid, kenabian, kitab-Nya, hari kemudian (akhirat) dan sebagainya yang berhubungan dengan doktrin aqidah
- 2) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak yaitu hal yang berkaitan dengan sifat dan akhlak manusia dalam menjalankan kehidupan diatas dunia yang berhubungan dengan perbuatan baik dan terpuji yang harus dilakukan dan menghindarkan diri dari sifat dan akhlak yang buruk (tercela)
- 3) Ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum amaliyah, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mukallaf. Dari hukum-hukum amaliyah ini lahir dan berkembanglah ilmu fiqih, hukum-hukum amaliyah dalam al-Qur'an terdiri dari dua cabang yaitu hukum-hukum ibadah yang

⁴⁰Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pernada Media Group, 2014), cet.ke-5, hlm. 79

⁴¹*Ibid*, hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hukum mu'amalat yang mengatur hubungan manusia dengan sesama.

Sementara itu Abdul Wahab Khallaf menjelaskan pembagian macam-macam hukum bidang *mu'amalat* dan jumlah ayatnya dalam al-Qur'an sebagai berikut⁴²:

- 1) Hukum perkawinan atau keluarga Islam, mulai dari terbentuknya pernikahan sampai masalah talak, rujuk, iddah, putusnya perkawinan disebabkan *li'an*, *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *nusyuz* dan sampai pada persoalan warisan dan sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan. Ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga sebanyak 70 ayat dalam al-Qur'an
- 2) Hukum *mu'amalat* (perdata) yaitu hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan yang sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, syirkah, utang piutang, hibah, dan sejenisnya yang berkaitan dengan perdata. Ayat yang mengatur hal ini sebanyak 70 ayat dalam al-Qur'an
- 3) Hukum *jinayat* (pidana Islam) yaitu hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan kejahatan, hukum-hukum jinayat ini bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, keamanan dan kenyamanan, seperti larangan membunuh, larangan menganiaya, larangan mencuri, larangan zina, qadzaf, larangan rampok, larangan mabuk, berjudi dan sejenisnya beserta sanksi-sanksi

⁴²*Ibid*, hlm. 93-94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

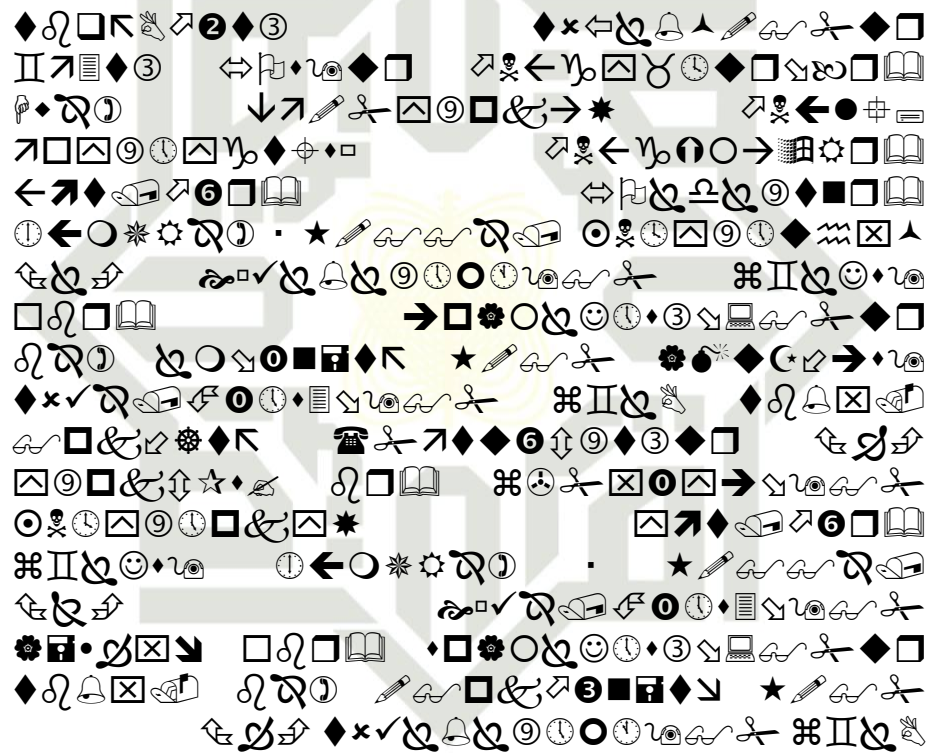
hukumnya. Ayat yang berkaitan dengan jinayat sebanyak 30 ayat dalam al-Qur'an

- 4) Hukum *al-murafaat* (acara) yaitu hukum yang berkaitan dengan peradilan, kehakiman, kesaksian, dan sumpah, yang dimaksudnya agar putusan hakim dapat memberikan keadilan sesuai dengan syari'at Islam. Ayat yang berkaitan dengan hal ini sebanyak 13 ayat dalam al-Qur'an
 - 5) Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Hukum ini dimaksudnya untuk mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya, mengatur hak dan kewajiban warga negara, ayat yang berkaitan dengan hal ini sebanyak 10 ayat dalam al-Qur'an
 - 6) Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antar bangsa, hubungan negara Islam dengan non-muslim. Ayat yang berkaitan dengan hal ini sebanyak 25 ayat dalam al-Qur'an
 - 7) Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang mengatur tentang hak-hak faqir dan miskin dari harta orang-orang kaya. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara orang kaya dengan faqir miskin serta antara negara dengan perorangan. Ayat yang mengatur hal ini sebanyak 10 ayat dalam al-Qur'an.
- b) Dalil *li'an* dalam al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan *li'an* dalam al-qur'an tergolong kedalam bagian dari persoalan hukum keluarga Islam, dan adakalanya dia termasuk kedalam bagian jinayat (pidana Islam) bila tuduhan itu mengandung unsur *qadzaf*. Adapun dalil tentang *li'an* dalam al-Qur'an adalah terdapat dalam surat *an-Nur* ayat 6-9, sebagai berikut:



Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya ia adalah termasuk orang yang benar, dan (sumpah) kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang berdusta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sumpah kelima laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar” (Q.S an-Nur: 6-9)⁴³

Dalam kitab tafsir *Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa kandungan ayat-ayat tersebut adalah jalan keluar bagi para suami dan hukum yang mempermudah pemecahan masalah bila seseorang dari mereka menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan ia sulit dalam mendatangkan saksi dan pembuktian, maka hendaklah ia melakukan *li'an* terhadap isterinya⁴⁴.

Adapun *asbabun nuzul*⁴⁵ dari ayat tersebut diriwayatkan dari imam bukhori sebagaimana ditulis dalam Kitab Tafsir surat an-Nur bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya Khaulah binti Ashim bin Adi berbuat zina dengan syarik bin Samha', kemudian ia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab “Datangkan empat orang saksi jika tidak hukuman hadd akan menimpa atas dirimu” Hilal berkata “Wahai Rasulullah apakah salah seorang dari kami jika melihat laki-laki diatas tubuh isterinya (berzina) harus mendatangkan empat orang saksi ? Rasul menjawab “datangkanlah saksi jika tidak balasannya hukuman had diatas punggungmu”. Hilal berkata demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran sesungguhnya aku berkata benar dan sungguh Allah pasti akan

⁴³ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 318

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, alih bahasa oleh Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), cet.ke-1, hlm. 11

⁴⁵ *Asababun Nuzul* secara harfiah artinya sebab-sebab turunya al-Qur'an, adalah merupakan ilmu al-Qur'an yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat al-Qur'an dituturkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurunkan wahyu yang membebaskan punggungku dari hukuman had.

Maka turunlah Jibril as dengan membawa wahyu dari Allah SWT surat an-Nur ayat 6 sampai 9 yang menjawab atas semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh Hilal bin Umayyah. Kemudian Hilal memberikan kesaksian kepada Rasulullah SAW atas tuduhannya, dan isteri Hilal juga memberikan kesaksian dengan sumpah sebanyak lima kali.

Dalam riwayat lain juga disebutkan tentang peristiwa yang melatar belakangi ayat tersebut turun yaitu dari Sa'id bin Jubair dengan peristiwa yang hampir sama dengan Hilal bin Umayyah pada penjelasan sebelumnya. Turunya surat an-Nur ayat 6 sampai 9 telah memberikan penjelasan dan solusi atas permasalahan bagi para suami yang menuduh isterinya berzina dengan laki-laki lain.

c) Hadist

Dasar hukum *li'an* yang kedua adalah hadist Nabi SAW. Secara bahasa hadist mempunyai tiga arti yaitunya *jadiid* (sesuatu yang baru), *Qariib* (yang dekat), dan *Khabar* (kabar/berita).⁴⁶ Sementara itu secara etimologi dikemukakan dua golongan pendapat ulama, yaitu:

1) Ulama hadist

⁴⁶ M.Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Bandung : Angkasa, 1985), cet. ke- 3, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama hadist, yang dimaksud dengan hadist adalah segala ucapan, segala perbuatan, segala taqrir (pengakuan) dan segala keadaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW⁴⁷

2) Ulama Ushul Fiqh

Menurut ulama ushul fiqh, yang dimaksud dengan hadist adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah yang berhubungan dengan hukum baik berupa perkataan (*qauliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*), maupun taqrir (*taqririyyah*)⁴⁸

d) Dalil *li'an* dalam Hadist Nabi Muhammad Saw

Hadist Nabi SAW merupakan sumber hukum Islam ke dua setelah al-Qur'an. Adapun dasar hukum *li'an* dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, dari Sa'id bin Jubair yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمِتْلَاعِنَانِ أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ. إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ. وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ص، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ آيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَآخَبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاَهَا وَوَعَظَهَا وَآخَبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ

⁴⁷Ibid, hlm. 2⁴⁸Ushul Fiqh, *Op.cit*, hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَقَالَ لَا، وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ تَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (احمد و البخارى و مسلم)

Artinya: “Dari Sa’id bin Jubair, bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, “ Hai Abu Abdurrahman, apakah Suami istri yang telah berli’an itu harus diceraikan antara keduanya”? ia menjawab, maha suci Allah memang begitulah dan sesungguhnya orang pertama yang pernah menanyakan hal itu adalah siFulan bin Fulan, ia bertanya kepada Rasulullah SAW “Wahai Rauslullahapa pendapatmu jika salah seorang dari kami mendapati isterinya melakukan perbuatan keji dan menjijikkan dan apa yang patut dilakukan? Jika suami membicarakannya maka dia telah bertanggung jawab diatas suatu perkara yang sungguh besar, begitu juga kiranya jika dia diam, Nabi SAW hanya diam saja dan tidak menjawabnya, setelah beberapa ketika, siFulan bin Fulan itu datang lagi kepada Rasulullah SAW dan berkata “sebenarnya perkara yang saya ajukan ini terjadi pada diri saya. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 6 (Dan orang-orang yang menunduh isterinya berzina padahal ia tidak mempunyai saksi-saksi selain dari diri mereka sendirimaka persaksian orang itu adalah dengan empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang benar” Nabi membacakan firman Allah tersebut dengan lengkap dan menasehati dengan mengingatkan bahwa sesungguhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siksa didunia itu tidaklah sebanding dengan siksa akhirat. Namun siFulan bin fulan tersebut itu tetap berkeras dengan berkata “tidak, demi Allah yang mengutusmu, aku tidaklah berdusta mengenai isteriku, ahirnya Rasulullah SAW memanggil isteri siFulan bin fulan tersebut. Nabi juga menasehati wanita tersebut dan mengingatkan bahwa siksaan di dunia ini tidaklah sebanding dengan siksaan akhirat. Namun wanita tersebut tetap dengan pendiriannya dan berkata “Demi tuhan yang mengutusmu, sesungguhnya dialah yang berdusta, maka Rasulullah SAW memulai dengan pihak suami, lalu dia bersumpah sebanyak empat kali bahwa sesungguhnya ia adalah orang-orang yang benar, sedangkan pada sumpah bke lima ia menyatakan bahwa laknat Allah atasnya jika dia termauk orang-orang yang berdusta. , kemudian Nabi SAW meneruskan pada pihak isteri maka ia berani bersumpah sebanyak empat kali bahwa sesungguhnya suaminya itu benar-benar orang yang berdusta dan sumpah kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Maka kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya”. (H.R Bukhari-Muslim)⁴⁹

Hadist diatas dijelaskan oleh para ulama *Ushul Fiqh* sebagai salah satu dari beberapa perawih hadist tentang *asbabun nuzul* surat *an-Nur* ayat 6-9 tentang *li'an*, cakupan hukum didalamnya memberikan solusi atas persoalan suami yang menuduh isterinya telah berbuat zina.⁵⁰

3. Sebab-Sebab Terjadinya *Li'an*

⁴⁹Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2011), cet.ke-11, hlm. 273-274

⁵⁰Tafsir Surat an-Nur, *op.cit*, hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Li'an merupakan salah satu persoalan yang terjadi antara suami dan isteri yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Suami menuduh isterinya berbuat zina, namun suami tidak memiliki empat orang saksi yang bersaksi atas kebenaran tuduhannya.

Tuduhan berzina tidak terlepas dari ketentuan *musyahadah* (penyaksian), yaitu seorang suami menyaksikan atau melihat isterinya berzina⁵¹. Zina yang dimaksud oleh ulama fiqih adalah setiap senggama yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah⁵² maka dia berkewajiban mendatangkan sebanyak empat orang saksi yang melihat perbuatan itu sama seperti yang dilihat, untuk menguatkan kebenaran atas tuduhannya tersebut.

Apabila suami tidak bisa mendatangkan sebanyak empat orang saksi maka dia dihadapkan pada hukuman *hadd* sebanyak delapan puluh kali dera atas tuduhannya karena termasuk kedalam permasalahan *qadzaf*, yaitu tuduhan terhadap seseorang dengan tuduhan zina atau menisbatkan seseorang pada perbuatan zina dengan syarat-syarat tertentu⁵³.

Sementara itu yang dimaksud dengan kesaksian dalam hal ini adalah berita pasti atau disebut dengan *musyahadah* artinya sesuatu yang nyata⁵⁴ yang benar-benar dilihat oleh saksi, karena saksi adalah

⁵¹Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Muhtadid*, alih bahasa oleh M.A.Abdurrahman dkk, Semarang, CV. Asy Syifa', 1990), cet.ke-1, hlm. 592

⁵²Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, alih bahasa oleh M. Misbah, (Jakarta : Rabbani Press, 2008), cet.ke-1, hlm. 510

⁵³*Ibid*, hlm. 512

⁵⁴Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), cet.ke-36, hlm. 635

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak melihatnya atau tidak mendengarnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)) yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri⁵⁵.

Dalam Islam setiap saksi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Adil

Maka saksi yang didatangkan oleh suami dalam perkara tuduhan zina haruslah berdasarkan pada saksi yang benar-benar melihat atau menyaksikan perbuatan tersebut.

Ketidak mampuan suami mendatangkan saksi-saksi sebagaimana telah ditentukan oleh al-Qur'an maka suami harus melaksanakan *li'an* agar terhindar dari hukuman had, sedangkan isteri juga terhindar dari hukuman had rajam dengan syarat bahwa dia juga menyangkal tuduhan suaminya dengan bersumpah sebanyak empat kali bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta atas

⁵⁵Mahkamah Konstitusi, *KUHP dan KUHP Edisi Lengkap*, (Yogyakarta, Panama Publishing, 2012), cet.ke-1, hlm. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhannya dan sumpah kelima bahwa laknak Allah diatasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya.⁵⁶

- 2) Suami tidak mengakui kehamilan isterinya atau menyangkal anak yang lahir dari isterinya.

Penafian itu terjadi manakala suami mengaku sama sekali belum pernah menyetubuhi isterinya sejak menikah, atau suami menuduh isterinya melahirkan kurang dari enam bulan setelah disetubuhinya, atau lebih dari enam bulan sejak disetubuhinya.⁵⁷

Penafian yang dimaksud yaitu sang suami menolak kehamilan isterinya atau ia menolak anak yang lahir dari isterinya karena ia merasa tidak pernah menyetubuhi isterinya yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang berujung pada lahirnya anak.

Para ulama mazhab berbeda pendapat pada persoalan ini, antara lain yaitu:

- a) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat sahnya dilakukan *li'an* dalam perkara penolakan ini apabila suami mengaku tidak pernah menyetubuhi isterinya dalam masa yang menyebabkan lahirnya seorang anak, atau sebaliknya ia telah menyetubuhi isterinya akan

⁵⁶Tafsir Surat an-Nur, *op.cit*, hlm. 90

⁵⁷Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Muhktashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Abdul Majid, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet.ke-1, hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi isterinya telah membersihkan rahimnya dari persetubuhan tersebut dengan satu kali haid⁵⁸

b) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *li'an* dalam perkara penolakan atau penyangkalan ini yaitu apabila sang suami telah menolak kehamilan isterinya sedangkan dia merasa tidak pernah menyetubuhi isterinya pada masa yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut.⁵⁹ Pendapat mazhab maliki dan mazhab syafi'i hampir sama dalam perkara penolakan atau penyangkalan ini.

c) Mazhab Hambali dan Hanafi

Mazhab Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa *li'an* dalam perkara penolakan terjadi apabila anak telah lahir dari sang isteri, dan tidak boleh melakukan penolakan kehamilan sebelum anak tersebut lahir⁶⁰.

Selain dari saksi *li'an* sebanyak empat orang yang melihat kejadian tersebut, maka saksi *li'an* juga harus dilihat dalam konteks kekinian yaitu menyesuaikan dengan kondisi kemajuan zaman dan teknologi, antara lain yaitu:

a) Pembuktian *Li'an* dengan Bukti DNA

DNA adalah singkatan dari *Deoxyribo Nucleic Acid* yang merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi dan data

⁵⁸Fiqih Islam, *op.cit*, hlm. 482

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang genetika. Adapun fungsi DNA adalah untuk mengidentifikasi gen, untuk menentukan garis keturunan antara anak dengan ayahnya dan serta untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya, untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu, dan sebagai zarah tersendiri dalam kromosom.⁶¹ Sehingga dengan demikian berdasarkan fungsi DNA tersebut maka pembuktian atas DNA dalam perkara *li'an* bisa dilakukan untuk menentukan kebenaran atas tuduhan dan atau sanggahan seorang suami atas anak yang dikandung oleh isterinya.

b) Pembuktian *Li'an* dengan Alat Bukti Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, alat bukti mengalami perkembangan dan pembaharuan dengan munculnya alat bukti elektronik dan atau dokumentasi elektronik, berupa video, gambar atau foto, rekaman suara dan transaksi elektronik lainnya. Sehingga keabsahan atas alat-alat bukti tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah.⁶²

⁶¹ Suryo, *Genetik Manusia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997), cet.ke-1, hlm. 73

⁶² Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 disebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Sedangkan dalam pasal 28 disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶³

Dalam perkara *li'an* yang berkaitan dengan tuduhan atas perbuatan zina bilamana kejadian tersebut pembuktiannya dalam bentuk rekaman kamera cctv (Closed Circuit Television), rekaman video dengan kamera atau dalam bentuk gambar atau foto, rekaman pembicaraan. Maka semua bukti-bukti tersebut sah untuk diajukan ke sidang pengadilan sebagai bukti elektronik.

4. Rukun dan Syarat *Li'an*

a) Rukun

Secara bahasa rukun diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya sesuatu pekerjaan, atau diartikan juga sebagai asas, dasar atau sendi.⁶⁴

Sementara itu rukun menurut istilah adalah suatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan, juga diartikan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu.⁶⁵ Menurut jumhur ulama, bahwa rukun *li'an* ada empat sesuatu, yaitu sebagai berikut:

⁶³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, *op.cit*.hlm. 432

⁶⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya laki-laki yang melaknat
 - 2) Adanya perempuan yang dilaknat
 - 3) Adanya sebab-sebab terjadinya *li'an*
 - 4) Adanya lafadz *li'an*⁶⁶
- b) Syarat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata syarat mempunyai lima arti sebagai berikut : *pertama* janji (sebagai tuntutan yang atau permintaan yang harus dipenuhi), *kedua* segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki dan sebagainya), *ketiga* segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, *keempat* ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, *kelima* biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun dan sebagainya.⁶⁷

Adapun syarat *li'an*, jumhur ulama membagi syaratnya menjadi dua yaitu syarat kewajiban *li'an* dan syarat sahnya pelaksanaan *li'an*.

- 1) Syarat kewajiban *li'an* antara lain, yaitu:
 - a) Pernikahan yang sah

Tidak sah *li'an* tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah antara suami dan isteri, meskipun sang isteri belum pernah disetubuhi oleh suami atau belum terjadinya persetubuhan antara keduanya

⁶⁶Fiqh Islam, *op.cit*, hlm. 485

⁶⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, *op.cit*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Mukallaf

Yaitu kedua pasangan suami dan isteri beragama Islam yang sudah berlaku padanya hukum taklifi, baligh dan berakal serta mempunyai kemampuan berbicara dengan lancar dan jelas

c) Adanya tuduhan

Yaitu tuduhan kepada isteri dengan tuduhan perbuatan zina, kemudian suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi selain dirinya sendiri

d) Isteri menolak tuduhan suaminya

Yaitu penolakan yang dilakukan oleh isteri sampai berakhirnya *li'an*, bahwa ia tidak menerima atas tuduhan suaminya⁶⁸.

2) Syarat sahnya pelaksanaan *li'an* antara lain, yaitu:

a) Dihadapan pengadilan

Sahnya *li'an* apabila dilaksanakan dihadapan pengadilan, karena perkara ini adalah sumpah dalam gugatan, maka tidaklah sah kecuali atas perintah hakim

b) *Li'an* dilaksanakan atas perintah qadhi

Yaitu masing-masing suami dan isteri mengucapkan kata sumpah *li'an* setelah diperintahkan oleh qadhi. Jika keduanya mengucapkan sebelum diperintahkan oleh qadhi maka tidaklah sah *li'an* nya

⁶⁸ Syaikh Saleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas al-Fiqhiyyah*, alih bahasa oleh Sufyan bin Fuad Baswedan, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013), cet. ke-1, jilid 3, hlm. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Menyempurnakan lafadz *li'an*

Yaitu menyempurnakan kelima lafadz *li'an*, bahwa suami bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa ia telah melihat isterinya berzina, dan bahwa anak yang dikandung oleh isterinya bukan hasil hubungan dengan dia, kemudian sumpah kelimanya adalah bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.

Selanjutnya isteri juga bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali, dengan membatalkan apa yang telah dipersaksikan oleh suaminya dan pada sumpah kelima ia berkata bahwa laknat atasnya jika adalah suaminya orang-orang yang benar.⁶⁹ Kelima lafadz sumpah *li'an* ini haruslah disempurnakan oleh suami dan isteri dalam perkara *li'an*

d) Berurutan

Yaitu berurutan antara lafaz-lafaz *li'an* yang diucapkan oleh suami dan isteri. Suami terlebih dahulu mengucapkan sumpah *li'an* kemudian baru isteri yang bersumpah.⁷⁰

5. Tata Cara Pelaksanaan *Li'an*

Para fuqaha telah menyepakati tentang pelaksanaan *li'an*, bilamana suami menuduh isterinya berzina atau menafikan anak yang terdapat didalam kandungan isterinya sementara suami tidak mempunyai saksi

⁶⁹Terjemahan Bidayatul Mujtahid, *op.cit*, hlm. 601

⁷⁰Fiqih Islam, *op.cit*, hlm. 491



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain dari dirinya sendiri dan isteri membantah tuduhan tersebut, maka hakim atau qadhi memerintahkan untuk melakukan *li'an*.⁷¹

Hakim memulia *li'an* dari suami dengan berkata “Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya aku berkata benar mengenai tuduhan zina atau penolakan nasab anak yang aku tuduhkan kepadanya” dengan menentukan maksud memberikan isyarat kepada isteri jika isteri hadir dalam persidangan tersebut. Sumpah tersebut diucapkan oleh suami sebanyak empat kali dan pada sumpah kelima suami mengatakan “Laknat Allah atas diriku bila aku termasuk orang-orang yang berdusta” maksudnya suami bersedia menerima sanksi atau laknat dari Allah SWT apabila tuduhan terhadap isterinya tidak benar.

Penolakan isteri terhadap tuduhan tersebut juga dibuktikan dengan sumpah yang diucapkan oleh isteri dengan mengatakan “Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia (suami) termasuk orang-orang yang berdusta atas tuduhannya” sebanyak empat kali, dan yang kelima isteri mengatakan “Laknat Allah atas diriku bila dia (suami) adalah termasuk orang-orang yang benar.”

Dalam tata cara pengucapan sumpah *li'an* diwajibkan untuk memulainya dari suami dengan alasan bahwa suami adalah penggugat, dan dalam perkara gugatan yang memulai bicara terlebih dahulu adalah orang yang menggugat.⁷² Apabila kedua pasangan suami isteri telah ber*li'an*,

⁷¹Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab : Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari*, alih bahasa oleh Ibnu Alwi Bafaqih, (Jakarta : Penerbit Cahaya, 2007), cet. ke-1, hlm. 608-609

⁷²Fiqh Islam, *op.cit*, hlm. 494

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka berlakulah bagi keduanya akibat atau dampak dari hukum li'an itu sendiri.

6. Akibat Hukum Li'an

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata akibat diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa. Sementara itu dalam perspektif filsafat ilmu hukum yang dimaksud dengan akibat hukum adalah segala akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum. Yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah setiap perbuatan dan pergaulan sosial kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁷³ Salah satu unsur dalam peristiwa hukum adanya perbuatan, yang dimaksud adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dalam upaya mencapai maksud adanya hukum.

Perbuatan hukum terbagi dua, yaitu *pertama* : Perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum itu sendiri, meskipun bagi hukum tidak perlu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. *kedua* : Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, meskipun akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga akibat hukum akan tetap berlaku bagi subjek perbuatan hukum baik akibatnya dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh subjek perbuatan

⁷³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), cet.ke-1, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum itu sendiri. Sementara subjek dari perbuatan adalah manusia dan badan hukum.⁷⁴

Adapun pemberlakuan akibat dari hukum *li'an* adalah dalam upaya untuk mencapai terwujudnya maksud dan tujuan dari pensyari'atan *li'an* itu sendiri. Akibat hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

a) Putusnya perkawinan untuk selamanya

Yaitunya pemisahan atau putusnya perkawinan antara suami dan isteri untuk selamanya,⁷⁵ hal ini disepakati oleh jumhur ulama bahwa kedua pasangan yang telah melakukan *li'an* tidak bisa kembali pada ikatan perkawinan untuk selamanya, karena *li'an* bukanlah talak, maka dia menjadi *fasakh* seperti halnya semua perkara yang menyebabkan batalnya atau putusnya perkawinan⁷⁶.

Akan tetapi imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemisahan akibat *li'an* bukanlah *fasakh* melainkan hanya talak *ba'in* dikarenakan pemisahan ini dilakukan oleh qadhi yang sama halnya pemisahan akibat impoten dan setiap pemisahan yang dilakukan oleh qadhi adalah talak *ba'in*.⁷⁷

Fasakh tidak sama atau berbeda dengan talak, sehingga para ulama fiqih mengemukakan beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara *fasakh* dengan talak, antara lain yaitu:

1) Perbedaan ditinjau dari segi hakikat

⁷⁴*Ibid*, hlm. 36

⁷⁵Tafsir Surat an-Nur, *op.cit*, hlm. 90-91

⁷⁶Fiqh Islam, *op.cit*, hlm. 503

⁷⁷*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasakh mengandung makna pembatalan dan apabila hal ini terjadi maka menghilangkan atau melepaskan seluruh akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Sementara talak adalah upaya untuk mengakhiri perkawinan dan seluruh akibat perkawinan akan hilang apabila terjadi talak yang ke tiga kalinya (*ba'in qubro*)

2) Perbedaan ditinjau dari segi penyebab

Fasakh adakalanya disebabkan oleh cacat pada akad nikah atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan ikatan perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Sementara talak adalah merupakan hak atas suami terhadap isterinya atau kemauan suami itu sendiri meskipun akad nikah tersebut tidak ada cacat

3) Perbedaan ditinjau dari segi kehendak melepaskan ikatan perkawinan

Fasakh secara umum tidak memiliki unsur kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan kecuali dalam *khiyar al-bulugh*. Sementara dalam talak unsur kehendak menjatuhkan talak dari pihak suami yang sangat menentukan, karena talak merupakan haknya suami, sehingga ia tidak akan jatuh kecuali suami yang mengucapkan kalimat talak tersebut

4) Perbedaan ditinjau dari segi akibat

Fasakh tidak mengurangi jumlah bilangan talak. Sementara perpisahan suami isteri melalui talak dapat mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki oleh suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Perbedaan ditinjau dari segi pembagiannya

Fasakh tidak memiliki pembagian, sehingga adanya rujuk bagi suami terhadap isteri. Sementara itu talak adakalanya talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua dimana suami bisa merujuk isterinya kembali selama dalam masa *'iddah*, dan adakalanya talak *ba'in* yaitu talak yang ketiga kalinya baik dalam bentuk *ba'in sughra* maupun *ba'in qubra*.

Dalam perkara *ba'in sughra* suami boleh rujuk kepada isterinya dengan syarat akad dan mahar yang baru, sedangkan dalam perkara *ba'in qubra* suami boleh kembali pada isterinya yang ditalak tiga dengan syarat isteri tersebut menikah dengan laki-laki lain kemudian dia bercerai dengan laki-laki tersebut tanpa ada unsur paksaan.

Akibat hukum dari pensyari'atan *li'an* itu sendiri tidak terhenti padaperkara putusnya perkawinan untuk selama-lamanya tapi yang pokok adalah adanya penegasan tentang larangan yang sampai pada tingkatan haram untuk kembali pada hubungan suami isteri, sehingga dengan demikian perkara ini menyerupai hubungan mahram,⁷⁸ dalam arti aspek hukumnya.

Mahram adalah semua orang atau wanita yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan *mushaharah*. Perempuan yang memiliki hubungan mahram dengan

⁷⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki, persusuan atau *mushaharah* diharamkan baginya menikah untuk selama-lamanya.

Pengharamannya bersifat *Tahrim Muabbad* yaitu haram untuk selama-lamanya⁷⁹ jika hal tersebut terjadi setelah perkawinan dilaksanakan maka dengan sendirinya perkawinan putus dalam bentuk *fasakh*. Maka sifat hukum *Tahrim Muabbad* juga berlaku bagi pengaharaman rujuk suami isteri yang telah berli'an.⁸⁰

b) Hilangnya nasab anak terhadap bapaknya

Yaitu anak yang lahir dari isteri tidak dinisbatkan kepada bapaknya, jika suami mengatakan bahwa anak itu bukanlah anaknya dan mengaku tidak pernah menggauli isterinya atau dia menuduh isterinya hamil saat dia tidak ada atau dia mengaku tidak pernah menggauli isterinya sebelum berlalunya waktu yang lebih panjang pada satu kali haid, maka anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya dan terputus nasab dari bapaknya.⁸¹

c) Tidak adanya nafkah, dantempat tinggal

Ini adalah merupakan dampak dari penolakan nasab oleh suami sehingga menyebabkan hilangnya nasab anak terhadap bapaknya dan akibat dari hilangnya nasab tersebut maka tidak ada hak

⁷⁹ Abdul 'Azim bin Badawi al-Khalafi, *Alwajiz, (Ensiklopedi Fiqih Islam dalam al-Qur'an dan Ash-Sunnah As-Shahihah)*, alih bahasa oleh Ma'ruf Abdul Jalil, (Jakarta : Pustaka ash-Sunnah, 2006), cet.ke-2, hlm. 569

⁸⁰ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, *op.cit*, hlm. 287-298

⁸¹ Tafsir Surat an-Nur, *Op.cit*, hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah dari bapak terhadap anak ataupun sebaliknya, tidak adanya hak tempat tinggal dari bapak terhadap anak atau isteri maupun sebaliknya.

- d) Suami tidak boleh merujuk isteri yang telah di *li'an*

Li'an merupakan hukum yang berdiri sendiri sehingga ia memiliki konsekuensi hukum yang mengharamkan bagi suami untuk merujuk isterinya kembali karena keduanya telah melakukan *li'an*, hal ini menegaskan bahwa *li'an* tidaklah sama dari semua bentuk talak, akan tetapi *li'an* merupakan bentuk *fasakh* terhadap perkawinan untuk selamanya.⁸²

- e) Tidak boleh menuduh zina terhadap isteri yang telah di *li'an* oleh suaminya

Yaitu setelah terjadinya proses *li'an* antara suami dan isteri dan keduanya telah berpisah atau putus ikatan perkawinan untuk selamanya maka tidak boleh siapapun yang menuduh kepada isteri dengan tuduhan zina, begitu juga dengan status anak yang ada tidak boleh di tuduh sebagai anak zina⁸³

- f) Tidak ada hak untuk saling mewarisi

Yaitu suami isteri yang putus hubungan perkawinan karena sebab *li'an* tidak ada hak waris atau mewarisi antara suami kepada isteri maupun kepada anak-anaknya, karena berkaitan dengan nasab,

⁸²*Ibid*, hlm. 92

⁸³*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa nasab anaknya telah terputus dengan suami (ayahnya) sehingga tidak dapat saling mewarisi⁸⁴.

g) Berlakunya hukuman *Hadd* bagi suami isteri

Hukuman *hadd* adalah merupakan hukuman yang diancam kepada pelaku jarimah hudud. Hukuman *hadd* diberlakukan kepada suami isteri yang ber*li'an* apabila menolak untuk melakukan *li'an*.

Penolakan yang dimaksud adalah salah seorang dari keduanya (suami-isteri) tidak mau mengucapkan *li'an* maka menurut jumhur ulama jika suami menolak ber*li'an* setelah ia menuduh dan ataumenafikan anak dari isterinya maka ia harus dijatuhi (dikenai) hukuman *hadd*.⁸⁵

Sementara itu jika isteri yang menolak ber*li'an* menurut Imam Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad dan jumhur fuqaha bahwa ia (isteri) dikenai dengan hukuman *hadd*, dan hukuman *hadd* nya adalah rajam jika suami telah menggaulinya dan dihukum jilid (dera) apabila suami belum menggauli isterinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ia (isteri) apabila menolak ber*li'an* maka wajib di hukum dengan hukuman kurungan sampai dia mau ber*li'an*.⁸⁶

Penolakan terhadap *li'an* oleh salah seorang dari keduanya (suami-isteri) adalah bentuk dari pembangkangan terhadap hukum

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 193

⁸⁵ Terjemahan Bidayatul Mujtahid, *op.cit*, hlm. 602-603

⁸⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Ghofur, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2012), cet. ke-1, hlm. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

li'an itu sendiri sehingga terjadinya penolakan dikawatirkan adanya dusta diantara salah satu keduanya.

7. Peningkaran Terhadap *Li'an*

Yaitu terjadi pendustaan terhadap *li'an* antara suami dan isteri setelah proses perkara *li'an* telah dilaksanakan baik pendustaan yang dilakukan oleh suami maupun oleh isteri. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila terjadi peningkaran atau pendustaan terhadap *li'an* setelah diucapkan oleh suami isteri maka dikenai hukuman *hadd*.⁸⁷

Sedangkan anak yang lahir dari ikatan tersebut dinisbatkan kepada ibunya meskipun suami mengingkari *li'an* dan hubungan keduanya (suami-isteri) tetap terputus serta tidak boleh berkumpul untuk selamanya sekalipun suami mengingkari dengan berdusta atas tuduhannya.⁸⁸

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga kata yaitu Kompilasi, Hukum dan Islam. Secara bahasa kompilasi diambil dari kata bahasa latin yaitu "*Compilare*" dalam bahasa inggris dikenal dengan "*Compilation*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*Compilatie*" artinya adalah mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana⁸⁹.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Kompilasi diartikan sebagai kumpulan yang tersusun secara teratur⁹⁰, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, atau disebut juga sebagai undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, atau hukum disebut juga sebagai ketentuan, kaedah, patokan atau putusan hakim.⁹¹

Sementara itu kata Islam diartikan sebagai agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT.⁹²

Maka Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai sebuah kumpulan hukum Islam dibidang muamalah yang berlaku dalam yuridiksi peradilan agama bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku yaitu : Buku I Tentang Perkawinan, Buku II Tentang Hukum Kewarisan dan Buku III Tentang Hukum Perwakafan.

2. Kodifikasi Hukum Islam

⁸⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), cet.ke-1, hlm. 2

⁹⁰ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Agung, 2005), cet.ke-1, hlm. 329

⁹¹ *Ibid*, hlm. 210

⁹² *Ibid*, hlm. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kodifikasi hukum Islam merupakan proses pengumpulan dan penyusunan hukum Islam secara sistematis yang berlaku bagi suatu negara dalam bidang-bidang tertentu. Kodifikasi hukum Islam yang dimaksud adalah proses pembukuan, unifikasi dan formalisasi hukum Islam kedalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara. Kodifikasi hukum Islam setelah berakhirnya Dinasti Bani Abbasiyah dilakukan oleh Daulah Ustmaniyah pada abad ke-13 H dalam bentuk *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah* dibidang mu’amalah sebanyak 1.851 pasal yang menjadi hukum undang-undang positif.⁹³

Selanjutnya proses kodifikasi, unifikasi dan formalisasi hukum Islam kedalam bentuk undang-undang dilakukan oleh pemerintah mesir pada tahun 1920 dengan menyusun undang-undang No.25 tahun 1920 tentang hukum keluarga (*al-ahwal asy-Syakhsiyah*) dan pada tahun 1936 pemerintah mesir melaksanakan kegiatan pembaharuan terhadap undang-undang keluarga yang lebih menyeluruh dengan memasukan cabang-cabangnya antara lain masalah wakaf, harta warisan dan wasiat dibawah kewenangan mahkamah syari’at dan majelis hisab.⁹⁴

Sementara itu, hukum Islam di Indonesia mulai dilakukan kodifikasi dan unifikasi serta formalisasi kedalam bentuk undang-undang sejak tahun 1985 sampai sekarang atau disebut dengan fase menuju

⁹³Ali Jumu’ah, *Sejarah Ushul Fiqih, Histori Ilmu Ushul Fiqih dari Masa Nabi Hingga Sekarang*, (Depok : Keira Publishing, 2017), cet.ke-1, hlm. 25

⁹⁴Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri’*, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), cet.ke-1, hlm.170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode *taqnin*.⁹⁵ Pada periode tersebut lahir kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang, yang secara unifikasi berlaku bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dan secara formal dikuatkan oleh instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 dan surat keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991⁹⁶ serta qanun Aceh Darussalam yang berlaku bagi seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemberlakuan Syari'at Islam No. 11 tahun 2020.⁹⁷

Pemberlakuan hukum Islam yang dimaksud adalah berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri telah diakui didalam landasan falsafah Pancasila dan landasan konstitusi nasional UUD 1945 pasal 29.⁹⁸

Para ulama fiqh kontemporer berbeda pendapat dalam menentukan periodisasi pembentukan hukum Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Antara lain yaitu Syaikh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas Cairo) dan Mustafa Ahmad Az-Zarqa (guru besar fiqh Islam Universitas Amman, Yordania).

Menurut Syaikh Khudari Bek periodisasi pembentukan hukum Islam terjadi selama enam periode, yaitu:

- a. Periode pertama yaitu sejak Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 182

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 187

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 191

⁹⁸ Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Karya Anda, 1994), cet.ke-1, hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Periode para sahabat besar
- c. Periode sahabat kecil dan tabi'in
- d. Periode awal abad ke-2 H sampai sampai pertengahan abad ke-4 H
- e. Periode perkembangan mazhab dan munculnya taklid mazhab
- f. Periode jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad ke-7 H sampai sekarang.⁹⁹

Sementara itu menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, membagi periodisasi pembentukan hukum Islam kepada tujuh periode, antara lain yaitu:

- a. Periode pertama yaitu masa Rasulullah Saw
- b. Periode kedua yaitu masa *Khulafa ar-Rasyidun*.
- c. Periode ketiga yaitu masa pertengahan abad ke-1 sampai abad ke-2 H.
- d. Periode ke empat yaitu masa pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4
- e. Periode ke lima yaitu masa pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H.
- f. Periode ke enam yaitu masa pertengahan abad ke-7 sampai munculnya *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* pada tahun 1286 H.
- g. Periode ke-7 yaitu masa sejak munculnya *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* sampai sekarang.¹⁰⁰

⁹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), cet. ke-7, jilid 3, hlm. 1795

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 1796-1798

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari periodisasi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih kontemporer dapat diuraikan bahwa sejarah pembentukan hukum Islam sebagai berikut:

- a. Pada masa Rasulullah Saw, yaitu dimana hukum Islam terbentuk dengan tidak memerlukan kaidah untuk memahaminya karena semua permasalahan langsung merujuk kepada Rasulullah Saw melalui penjelasan beliau mengenai al-Qur'an dan sunnahnya, selain dari itu, ijtihad juga sudah terjadi pada masa Rasulullah Saw dimana Rasul memerintahkan sahabat yaitu *Mu'az bin Jabal* untuk menjadi hakim di negeri yaman.¹⁰¹ Masa ini disebut dengan *al-Insyā' Wa al-Takwīn*.¹⁰² berlangsung selama 22 tahun (610-632) dimakkah dan kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah.
- b. Pada masa sahabat disebut dengan masa penyempurnaan hukum Islam atau dikenal dengan masa *al-Tafsir Wa al-Takmil* yaitu selama 90 tahun dari tahun 11 hijriyah sampai pada akhir abad ke-1.¹⁰³ Pada masa ini ijtihad dan ijma' sahabat sudah berkembang seiring dengan munculnya berbagai persoalan ditengah-tengah masyarakat Islam dan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Adapun sumber atau dalil hukum Islam pada masa sahabat yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw serta Ijtihad dan Ijma'.¹⁰⁴

¹⁰¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2000), cet. ke-1, hlm. 33

¹⁰² Ikhtisar Tarikh Tasyri', *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, *op.cit*, hlm. 5

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam, op.cit*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masa Mujtahid yaitu masa munculnya kitab-kitab fiqh atau dikenal dengan masa *'ahdu al-Tadwin*, berlangsung selama 250 tahun (100-350 H)¹⁰⁵. Hukum Islam berkembang dan mengalami kemajuan karena pada masa inilah gerakan penulisan dan pembukuan hukum-hukum Islam, hadist-hadist Nabi Saw, fatwa-fatwa dari kalangan sahabat, tabi'in, tafsir al-Qur'an, fiqh para imam mujthaid serta berbagai risalah ilmu ushul fiqh telah di kodifikasikan dalam bentuk pembukuan.¹⁰⁶ Sementara itu sumber-sumber hukum pada masa mujtahid adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw, Ijma' dan Ijtihad dengan metode qiyas atau ijtihad dengan salah satu metode istimbath.¹⁰⁷ Perkembangan hukum Islam pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
 - 1) Perhatian Khalifah terhadap fiqh dan fuqaha. Khalifah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah mengangkat fuqaha sebagai penasehat dalam kebijakan negara.¹⁰⁸ Kitab-kitab fiqh dijadikan sebagai fiqh mazhab negara, seperti dinasti daulah Abbasiyah menjadikan mazhab hanafi sebagai kitab fiqh resmi negara¹⁰⁹
 - 2) Munculnya para iman mujtahid, mereka bersama-sama mengembangkan fiqh. Khususnya mazhab yang empat yaitu imam

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 6

¹⁰⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2002), cet.ke-2, hlm. 71

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 81

¹⁰⁸ Sejarah Ushul Fiqih, Histori Ilmu Ushul Fiqih dari Masa Nabi Hingga Sekarang, *op.cit*, hlm. 20

¹⁰⁹ Esiklopedi Hukum Islam, *Loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab syafi'i, mazhab hanafi, mazhab hanbali dan mazhab maliki.¹¹⁰

- 3) Perluasan wilayah Islam, dengan semakin luasnya wilayah Islam dari Spanyol hingga sampai ke China mempengaruhi terhadap perkembangan hukum Islam karena beragam budaya dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang diletarikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam¹¹¹
- 4) Pembukuan Hadist Nabi Saw. Pada masa ini buku-buku hadist telah dibukukan sehingga sudah diketahui mana hadist yang shahih dan mana yang dhai'f, hal ini memudahkan para mujtahid dalam beristimbath hukum.
- d. Masa Taklid dan Kemunduran terjadi pada pertengahan abad ke-4 sampai pada pertengahan abad ke-7. Periode ini dikenal dengan masa jumud dalam bidang fiqh karena para fuqaha lebih memilih untuk bertaklid kepada mazhab-mazhab yang telah ada sebelumnya.

Faktor-faktor penyebab taklid dan kemunduran adalah sebagai berikut:

- 1) Melemahnya kekuatan politik Dinasti Bani Abbasiyah disebabkan oleh konflik politik dengan berbagai kelompok antara lain dengan sekte syi'ah, bangsa turki, bani buwaihi, turki saljuk dan terakhir dengan bangsa mongol yang dipimpin oleh Khulaqu Khan

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Sejarah Ushul Fiqih, Histori Ilmu Ushul Fiqih dari Masa Nabi Hingga Sekarang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meruntuhkan kekhalifaan Dinasti Bani Abbasiyah pada tanggal 10 Februari 1258 M.¹¹²

- 2) Terhentinya istinbath hukum dengan sebab dibukukanya mazhab-mazhab fuqaha sebelumnya disertai dengan tahdzib masail (klasifikasi masalah) dan sistematika pembahasan, sehingga dianggap sudah perlu lagi untuk beistinbath hukum.¹¹³
- 3) Melemahnya kepercayaan diri serta rasa takut berijtihad, sehingga para fuqaha menganggap diri mereka tidak mampu untuk berijtihad.
- e. Masa sekarang, yaitu sejak runtuhnya Baghdad abad ke-8 hijriyah sampai sekarang para fuqaha belum mampu berijtihad secara mutlak. Akan para ulama menulis kitab-kitab dalam bentuk *mukhtasar* (ringkasan) dari kitab-kitab fiqh terdahulu.¹¹⁴

3. Latar Belakang Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Indonesia merupakan negara dengan salah satu penduduk muslim terbesar didunia. Perkembangan Islam di nusantara sudah dimulai jauh sebelum datangnya penjajahan kolonial belanda, yang dibawa oleh para pedagang muslim yang masuk ke wilayah nusantara pada abad ke-13 sebagian pendapat mengatakan pada abad ke-7 Islam sudah masuk ke Indonesia. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh para saudagar melalui

¹¹² Syamruddin Nasution, *Konflik-Konflik Politik dalam Sejarah Islam*, (Pekanbaru : Asa Riau, 2017), cet.ke-1, hlm. 195

¹¹³ Sejarah Ushul Fiqih, Histori Ilmu Ushul Fiqih dari Masa Nabi Hingga Sekarang, op.cit, hlm. 21

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan dan perkawinan dan hukum Islam mempunyai peran yang sangat besar dalam hal tersebut¹¹⁵.

Sebelum kolonial penjajahan Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping 445 kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini. Menurut Ahmad Djamil Latif, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia, pengaruh itu tampak dalam hukum keluarga dan hukum pidana.¹¹⁶ Seperti misalnya para pedagang muslim menikahi pribumi dengan memberlakukan syari'at Islam didalamnya, kehidupan keluarga yang berlangsung setelah pernikahan diatur dengan ketentuan yang sesuai dengan syari'at Islam dan seterusnya.

Setelah kolonial belanda datang ke Indonesia, keberadaan dan eksistensi hukum Islam dikelompokkan kedalam beberapa teori antara lain:

a) Teori *Receptio in Complexu*

Yaitu hukum Islam telah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam¹¹⁷, teori ini dimunculkan oleh Van Den Berg(1845- 1927) yang mendukung pemberlakuan hukum Islam bagi pemeluk agama

¹¹⁵ A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang : Unissula Press, 2011), cet.ke-1, hlm.

¹¹⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, *Op.cit*, hlm. 445-446

¹¹⁷ Hukum Peradilan Agama, *op.cit*, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam¹¹⁸. Dengan demikian pemerintah Belanda mengakui bahwa hukum atau peraturan yang berlaku dilingkungan masyarakat Indonesia asli adalah berdasarkan peraturan atau hukum agama yang dianutnya¹¹⁹. Meskipun demikian pemerintah Belanda melakukan pengawasan terhadap jalannya hukum Islam dan memberikan kewenangan kepada qadhi atau hakim agama dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 13 Stb 1.1820 No.20 yang berbunyi:

“Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta, dan sengketa-sengketa yang sejenis yang harus diputuskan menurut hukum Islam, para pemuka agama memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan pemuka agama itu harus dimajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”¹²⁰

b) Teori *Receptie*

Yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing, hukum Islam dapat berlaku apabila hukum Islam telah diterima oleh hukum adat. Teori ini juga disebut dengan teori hukum adat¹²¹. Teori ini muncul dari pemikiran *Christian Snouck Hurgronje* (1857- 1936) yang

¹¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013), cet. ke-1, hlm. 13

¹¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Iltizam, 2016), cet. ke-1, hlm. 17

¹²⁰ *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, op.cit, hlm. 14

¹²¹ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung “ Simbiosis Ekatama Media, 2018), cet. ke-1, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh *Cornells van Vollenhovendan Betrand ter Haar Bzn* serta dilaksanakan dalam praktik oleh murid-murid dan pengikutnya.¹²²

Teori *receptie* yang dikeluarkan oleh *Snouck Hurgronje* tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam yang telah berlaku selama ini, sehingga terjadi reaksi keras dan penolakan dari umat Islam. Hazairin menyebut teori *receptie* dengan teori iblis.¹²³ Teori ini menjauhkan umat Islam dari al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

c) Teori *Receptie a Contrario*

Yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini berusaha mengembalikan kejayaan hukum Islam¹²⁴. Teori ini dikemukakan oleh pakar hukum adat Indonesia yaitu Hazairin dan Sayuti Thalib.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan hukum Islam diatur dalam bentuk peraturan undang-undang seperti undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional yang telah berlaku. Kemudian keluar undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut secara yuridis formal, hukum Islam dalam

¹²²Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, *Loc.cit*

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Hukum Perdata Islam di Indonesia, *op.cit*, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dan segala akibat yang telah ditimbulkannya telah berlaku.¹²⁵ Pada tahun 1977 dikeluarkan peraturan presiden Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Kebutuhan akan adanya kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara oleh para hakim di lingkungan peradilan agama sudah lama dirasakan, terbukti Departemen Agama pada waktu itu mengeluarkan Surat Edaran No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang menganjurkan penggunaan 13 (tiga belas) macam kitab fiqih sebagai pedoman. Bahkan sejak adanya Peradilan Agama di Indonesia, keperluan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dirasakan.¹²⁶

Selanjutnya pada tahun 1989 dikeluarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama didalamnya mengisyaratkan bahwa hukum Islam telah diterima dan diberlakukan bagi umat Islam. Dan akhirnya sampai pada tahun 1991 dikeluarkan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menjadi sangat penting bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam yang sesuai dengan ketentuan dari hukum-hukum fiqih itu sendiri. Bagi para hakim Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan sebagai pedoman yang

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 20

¹²⁶ A. Khisni, *Fiqih Kontemporer, Kompilasi Hukum Islam Produk Lialitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer*, (Semarang : Unnissula Press, 2017, cet. ke-3, hlm. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seragam (unifikasi) dan sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang bergama Islam.¹²⁷

Maka dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fiqh Indonesia yang disusun dan dikodifikasi sesuai dengan hukum fiqh dan kebutuhan umat Islam Indonesia itu sendiri.¹²⁸ Dalam sistem hukum Indonesia ketentuan hukum Islam tidak bisa berlaku jika tidak di susun dalam bentuk undang-undang atau ditaqinkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks ini secara formal disahkan oleh ketentuan instruksi presiden, dan berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dalam lingkungan peradilan Agama diseluruh Indonesia.

4. Proses Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diyakini sebagai sebuah produk Hukum perdata Islam yang berlaku dilingkungan peradilan agama Republik Indonesia yang mengatur persoalan perdata bagi ummat Islam Nusantara (Indonesia), keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, karena persoalan tentang agama telah diatur dengan jelas baik secara yuridis maupun formal dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yaitu “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”¹²⁹ dan kebebasan dalam menjalankan agama diatur dalam pasal 29 ayat (2)

¹²⁷Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, *Op.cit*, hlm. 452

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015), cet.ke-5, hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD 1945 yaitu “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamannya dan kepercayaannya itu*”¹³⁰.

Menurut Hazairin sebagaimana dimuat dalam buku Peradilan Agama di Indonesia yang ditulis oleh Prof.Dr. H. Pagar, M.Ag bahwa tafsiran dari pasal 29 tersebut memungkinkan tiga macam, yaitu: *Pertama*, didalam negara Republik Indonesia tidak boleh adanya berlaku suatu hukum atau norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun norma-norma kesusilaan bangsa Indonesia yang berdasarkan kaidah fundamental yaitunya Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, dalam konteks keagamaan Negara Republik Indonesia harus memberikan kewenangan dan memfasilitasi pemberlakuan hukum Islam bagi ummat Islam, hukum Nasrani bagi ummatnya, hukum Hindu Budha bagi ummatnya dan hukum kristen, katolik, protestan, bagi ummatnya. *Ketiga*, Hukum agama masing-masing tidak perlu bantuan kekuasaan negara dalam melaksanakannya, karena dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan.¹³¹

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan pasca perumusan UUD 1945, maka proses pembentukan hukum perdata Islam telah melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan lembaga peradilan sampai pada terbentuknya materi hukum yang digunakan dalam sistem peradilan agama, sebagai berikut:

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan, Perdana Publishing, 2015), cet.ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pada tahun 1946 pemerintah menyerahkan urusan pembinaan Peradilan Agama dari Menteri Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946
- b) Pada tahun 1948 peradilan agama digabungkan kedalam peradilan umum berdasarkan UU No. 19 tahun 1948
- c) Pada tahun 1957, pemerintah mengatur pembentukan peradilan agama diluar pulau jawa, madura dan kalimantan selatan melalui peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957. Kemewangan peradilan agama dilura pulau jawa, madura dan kalimantan selatan tersebut meliputi persoalan nikah, talak, ruju', fasakh, nafakah, mahar, tempat tinggal, mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, shadaqah dan baitul mal
- d) Pada tahun 1970 dikeluarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat (1) dalam UU No. 14 tahun 1970 tersebut dijelaskan tentang "*Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya*". Kemudian pelaksanaan tugas pokok kekuasaan badan-badan peradilan tersebut diatur dalam pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 yaitu "*Kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) peradilan umum, (b) perdilan Agama, (c) peradilan Militer, (e) peradilan Tata Usaha Negara*"
- e) Pada tahun 1974 dikeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk realisasi dari ketentuan dalam UU. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan bentuk kodifikasi¹³² dan unifikasi¹³³ dari hukum perkawinan di Indonesia, yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia, undang-undang tersebut merupakan awal dari landasan yang kokoh terhadap berlakunya hukum Islam secara yuridis.¹³⁴

- f) Pada tahun 1989 lahir UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang RUU nya sudah diajukan sejak 1970 bersamaan dengan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan suatu harapan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa menjadi sebuah undang-undang, karena penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasari oleh Yurisprudensi yang tertuang dalam keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25/1985 tanggal 21 Maret 1985¹³⁵
- g) Pada tahun 1988 penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selesai dilaksanakan yang diakhiri dengan pengolahan data dan lokakarya tingkat nasional diikuti oleh para ulama, ahli hukum, cendikiawan dan para tokoh masyarakat.¹³⁶
- h) Pada tahun 1991 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Nomor 1 tahun 1991 tentang menyebarluaskan Kompilasi Hukum

¹³²Kodifikasi yang dimaksud adalah dalam konteks hukum merupakan proses pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan sebuah kitab undang-undang.

¹³³Unifikasi adalah merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara menyeluruh atau nasional.

¹³⁴Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Op.cit*, hlm. 31-32

¹³⁵*Ibid*, hlm. 36

¹³⁶Aulia Muthia, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), cet.ke-1, hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang terdiri dari buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang perwakafan.¹³⁷ Intruksi tersebut ditujukan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama.

- i) Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.¹³⁸ Sejak keluarnya Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Agama maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilaksanakan secara seksama dan menyeluruh serta menjadi pedoman dan pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara di lingkungan peradilan agama di Indonesia.

5. Sumber Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk dari kodifikasi hukum Islam yang berlaku di ruang lingkup peradilan agama di Indonesia yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan Sunnah.¹³⁹

Al-qur'an dan Sunnah sebagaimana difahami dalam kajian *ushul fiqh* adalah merupakan objek pertama dan paling utama dalam upaya kegiatan penelitian terhadap berbagai permasalahan hukum serta sebagai dasar utama dalam upaya pemecahan suatu hukum.¹⁴⁰ Sehingga para mujtahid dalam melakukan ijtihad maupun para ulama dalam mengeluarkan fatwa, serta para pakar hukum Islam dalam merumuskan suatu hukum-hukum Islam yang ingin memberlakukan dalam suatu negara

¹³⁷Redaksi Simabua Mitra Usaha, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Medan : Duta Karya Medan, 1995), cet. ke-1, hlm. 60

¹³⁸*Ibid*, hlm. 61

¹³⁹Hukum Islam, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, *op.cit*, hlm. 43

¹⁴⁰Ushul Fiqh, *op.cit*, hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kelompok masyarakat tidak akan lepas dari sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Demikian halnya dengan perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan pemahaman yang lebih luas yaitu rumusan dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual.¹⁴¹

Selanjutnya setelah disepakai akan sumber utamanya, proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan dalam beberapa jalur sebagai berikut:

a) Jalur pengkajian terhadap kitab-kitab Fiqih

Kitab secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti tulisan atau buku, sementara itu secara istilah diartikan sebagai tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul menjadi satu bentuk buku.¹⁴² Dari penjelasan definisi tersebut diambil suatu pemahaman bahwa pengkajian terhadap kitab fiqh yang dimaksud adalah pengkajian terhadap kitab-kitab fiqh, buku atau tulisan yang memuat tentang hukum-hukum syara'. Karena fiqh adalah merupakan ilmu syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat amaliah yang digadali dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁴³

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam yang menjalankan syari'atnya berdasarkan pada dalil-dali dan

¹⁴¹ Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga, *op.cit*, hlm. 43

¹⁴² <https://brainly.co.id>

¹⁴³ Sejarah Ushul Fiqih, *op.cit*, hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum yang telah ditulis oleh para imam mujtahid dalam berbagai kitab fiqihnya, sehingga yang umum dipakai di Indonesia adalah merupakan kitab-kitab fiqih dari para imam Mazhab yang empat yaitu imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, imam Maliki dan imam Ahmad bin Hambal.

Dengan demikian dalam perumusan hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan pengkajian terhadap kitab-kitab fiqih yang bersumber dari para imam mazhab baik kitab yang ditulis langsung oleh imam mazhab yang empat, kitab yang ditulis oleh para murid-muridnya, maupun kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang berfaham kepada salah satu dari imam mazhab.

Pengkajian terhadap jalur kitab fiqih yaitu dengan melakukan pengkajian dan telaah secara menyeluruh terhadap berbagai kitab-kitab fiqih. Melalui jalur ini disepakati sebanyak 38 kitab fiqih yang diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi Islam/IAIN di Indonesia. Adapaun perguruan tinggi Islam yang melakukan pengkajian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) IAIN Arraniri Banda Aceh, yang mengkaji kitab *al-Bajuri*, *fath al-Mu'in*, *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, *Mughni al-Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj*, dan *al-Syarqawi*
- 2) IAIN - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengkaji kitab *I'anat al-Thalibin*, *Tuhfah*, *Targhib al-Musytaq*, *Bulghah al-Salik*, *Syamsuri fi al-Faraidl*, dan *al-Mudawanah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) IAIN Antasari Banjarmasin, yang mengkaji kitab *Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, al-Um, Bughyah al-Mustarsyidin, dan al-Aqidah wa al-Syari'ah*
- 4) IAIN – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengkaji kitab *al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah dan Fiqih al-Sunnah*
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang mengkaji kitab *Kasyf al-Ghina, Majmu'at Fatawa al-Kubra lil ibn Taymiyah, Qawanin al-Syari'ah li al-Sayid Utsman ibn Yahya, al-Mughini dan al-Hidayah Syarh al-Bidayah*
- 6) IAIN – UIN Alauddin Ujung Pandang, yang mengkaji kitab *Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah ibn 'Abidin, al-Muwaththa', dan Hasyiyah al-Dasuqi*
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang, yang mengkaji kitab *Bada'i al-Shana'i, Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir, dan Nihayah*.¹⁴⁴

Pengkajian terhadap kitab ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi Islam / IAIN adalah bertujuan untuk menemukan hukum-hukum mengenai permasalahan yang disertai dengan argumentasi atau dalil-dalil hukumnya.¹⁴⁵

b) Jalur Ulama

Ulama secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *'alim* yang berarti “yang tahu” atau “yang mempunyai pengetahuan” dalam al-

¹⁴⁴Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Op.cit*, hlm. 38

¹⁴⁵Peradilan Agama Di Indonesia, *Op.cit*, hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an kata ulama ditemukan dalam 2 ayat dengan surat yang berbeda yaitu dalam surat *al-Fatir* ayat 28 dan surat *asy-Syu'ara* ayat 196-197. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ulama secara istilah adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa *khasyyah* (rasa takut dan tunduk) kepada Allah SWT.¹⁴⁶

Di Indonesia, ulama diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fiqh¹⁴⁷ sehingga para ulama di Indonesia dijadikan sebagai pedoman dan panutan dalam segala urusan persoalan keagamaan, termasuk dalam perumusan hukum Islam.

Pengkajian melalui jalur ulama yaitu dengan melakukan dialog dan wawancara dengan para ulama dan tokoh cendekiawan muslim Indonesia di sepuluh wilayah yang ditetapkan oleh panitia proyek pembangunan hukum Islam, antara lain yaitu Banda Aceh, Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Padang (Sumatera Barat), Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), Mataram (NTB), dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).¹⁴⁸

Kegiatan jalur ulama dengan metode wawancara dan dialog bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan hukum fiqh yang

¹⁴⁶ Azzumardi Azza, *op.cit*, hlm. 154

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 155

¹⁴⁸ Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Op.cit*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, diterapkan dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Islam , sehingga diharapkan penyusunan proyek pembangunan hukum Islam ini benar-benar aspiratif serta sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴⁹

c) Jalur Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah merupakan keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim yang lain dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Pengkajian melalui jalur yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan pengadilan agama yang telah terhimpun dalam lima belas buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA terdapat tiga buku
- 2) Himpunan fatwa sebanyak tiga buku
- 3) Yurisprudensi PA sebanyak lima buku
- 4) Law report sebanyak empat buku¹⁵⁰

d) Jalur Studi Perbandingan

Yaitu dengan melakukan studi ke luar negeri dengan mengunjungi negara-negara muslim, hal ini dilakukan untuk dapat melihat dan mengetahui tentang pelaksanaan hukum Islam dinegara-negara muslim tersebut, antara lain yaitu:

- 1) Maroko dilaksanakan pada tanggal 28-29 oktober 1986
- 2) Turkey dilaksanakan pada tanggal 1-2 November 1986
- 3) Mesir dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 1986¹⁵¹.

¹⁴⁹*Ibid*, hlm. 40

¹⁵⁰*Ibid*.

¹⁵¹*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sistematika Materi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Proyek Pembangunan Hukum Islam yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang bekerjasama dengan lembaga Yudikatif yaitunya Mahkamah Agung RI menghasilkan sebuah ketentuan hukum perdata Islam yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Proyek Pembangunan Hukum Islam selesai dilaksanakan pada tahun 1988 yang diakhiri dengan kegiatan Lokakarya Nasional pada tanggal 2-6 februari 1988 di Hotel Kartika Candra Jakarta yang diikuti oleh sebanyak 124 peserta seluruh Indonesia yang terdiri dari unsur Ulama, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Cendikiawan muslim, ahli hukum konvensional di Indonesia.

Lokakarya secara nasional dilaksanakan setelah melakukan proses pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draf oleh tim yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan hukum Islam yang bertujuan untuk menggalang *ijma'*, ahli-ahli hukum Islam dan ahli hukum konvensional di Indonesia, kegiatan lokakarya juga sebagai refleksi dan puncak perkembangan pemikiran fiqih Indonesia.¹⁵²

Lokakarya yang dilaksanakan dibagi kedalam tiga komisi yang membahas pokok-pokok materi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun komisi tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵²*Ibid*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Komisi I

Yaitu komisi yang membahas tentang hukum perkawinan yang dipimpin oleh ketua H.Yahya Harahap, sekretaris H. Mafruddin Kosasih, dengan narasumber KH. Halim Muchammad, S.H yang beranggota sebanyak 42 orang.¹⁵³ Dari hasil pembahasan Komis I tentang perkawinan disepakati sebanyak 19 (sembilan belas) Bab yang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) pasal, yaitu:

- 1) Bab I Ketentuan Umum, yang terdiri dari 1 pasal
- 2) Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, terdiri dari 9 pasal yaitu dari pasal 2 sampai pasal 10
- 3) Bab III Peminangan, terdiri dari 3 pasal yaitu dari pasal 11 sampai pasal 13
- 4) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan, terdiri dari 16 pasal yaitu dari pasal 14 sampai pasal 29
- 5) Bab V Mahar, terdiri dari 9 pasal, yaitu dari pasal 30 sampai pasal 38
- 6) Bab VI Larangan Kawin, terdiri dari 6 pasal, yaitu dari pasal 39 sampai pasal 44
- 7) Bab VII Perjanjian Perkawinan, terdiri dari 8 pasal, yaitu dari pasal 45 sampai pasal 52
- 8) Bab VIII Kawin Hamil, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 53 sampai pasal 54
- 9) Bab IX Beristeri lebih dari satu orang, terdiri dari 5 pasal, yaitu dari pasal 55 sampai pasal 59

¹⁵³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Bab X Pencegahan perkawinan, terdiri dari 10 pasal, yaitu dari pasal 60 sampai pasal 69
- 11) Bab XI Batalnya Perkawinan, terdiri dari 7 pasal, yaitu dari pasal 70 sampai pasal 76
- 12) Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri, terdiri dari 8 pasal, yaitu dari pasal 77 sampai pasal 84
- 13) Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, terdiri dari 13 pasal, yaitu dari pasal 85 sampai pasal 97
- 14) Bab XIV Pemeliharaan Anak, terdiri dari 9 pasal, yaitu dari pasal 98 sampai pasal 106
- 15) Bab XV Perwalian, terdiri dari 6 pasal, yaitu dari pasal 107 sampai pasal 112
- 16) Bab XVI Putusnya Perkawinan, terdiri dari 35 pasal, yaitu dari pasal 113 sampai pasal 148
- 17) Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, terdiri dari 13 pasal, yaitu dari pasal 149 sampai pasal 162
- 18) Bab XVIII Rujuk, terdiri dari 7 pasal, yaitu dari pasal 163 sampai pasal 169
- 19) Bab XIX Masa Berkabung, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 170¹⁵⁴.

b) Komisi II

Yaitu komisi yang membahas tentang hukum kewarisan yang dipimpin oleh ketua H.A Wasit Aulawi, MA. Sekertaris H. Zainal

¹⁵⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Fajar Offset, 2004), cet.ke-1, hlm. 312-353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abidin Abu Bakar, dan Narasumber K.H.A. Azhar Basyir, MA yang beranggota sebanyak 42 orang.¹⁵⁵ Dari hasil pembahasan Komis I tentang hukum kewarisan disepakati sebanyak 6 (enam) Bab yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal, yaitu:

- 1) Bab I Ketentuan Umum, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 171
- 2) Bab II Ahli Waris, terdiri dari 4 pasal, yaitu dari pasal 172 sampai pasal 175
- 3) Bab III Besarnya Bagian, terdiri dari 16 pasal, yaitu dari pasal 176 sampai pasal 191
- 4) Bab IV Aul dan Rad, terdiri dari 2 pasal, yaitu dari pasal 192 sampai pasal 193
- 5) Bab V Wasiat, terdiri dari 16 pasal, yaitu dari pasal 194 sampai pasal 209
- 6) Bab VI Hibah, terdiri dari 5 pasal, yaitu dari pasal 210 sampai pasal 214.¹⁵⁶

c) Komisi III

Yaitu komisi yang membahas tentang hukum perwakafan yang dipimpin oleh ketua Masrani Basran. Sekertaris H. A.Gani Abdullah,S.H, dan Narasumber Prof. Rachmat Djatnika yang beranggota sebanyak 29orang.¹⁵⁷ Dari hasil pembahasan Komis I tentang hukum perwakafan disepakati sebanyak 5 (lima) Bab yang terdiri dari 15 (lima belas) pasal, yaitu:

¹⁵⁵Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Loc.cit.*

¹⁵⁶Peradilan Agama Di Indonesia, *op.cit*, hlm. 353-362

¹⁵⁷Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bab I Ketentuan Umum, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 215
- 2) Bab II Fungsi, Unsur-Unsur, dan Syarat-Syarat Wakaf, terdiri dari 7 pasal, yaitu dari pasal 216 sampai pasal 222
- 3) Bab III Tata cara Wakaf dan Pendaftaran Benda Wakaf, terdiri dari 2 pasal, yaitu dari pasal 223 sampai pasal 224
- 4) Bab IV Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Benda Wakaf, terdiri dari 3 pasal, yaitu dari pasal 225 sampai pasal 227
- 5) Bab V Ketentuan Peralihan, terdiri dari 2 pasal, yaitu dari pasal 228 sampai pasal 229.¹⁵⁸

Maka dengan demikian sistematika materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun sebanyak tiga buku yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang Kewarisan, dan buku III tentang perwakafan. Ketiga buku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut disahkan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, maka sejak itulah Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara formal berlaku sebagai hukum materil dilingkungan peradilan agama seluruh Indonesia.¹⁵⁹

C. Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkara putusnya perkawinan pada bab ke-16 bagian ke satu umum pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus karena :

¹⁵⁸Peradilan Agama Di Indonesia, *op.cit*, hlm. 363-368

¹⁵⁹Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *op.cit*, hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kematian
- b) Perceraian, dan
- c) Atas putusan pengadilan¹⁶⁰

Pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Kematian

Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup diatas dunia. Kematian bisa mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri, hal ini bisa terjadi apabila salah seorang dari kedua belah pihak (suami-isteri) meninggal dunia. Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- a) Separuh dari harta bersama yang ditinggalkan menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan pengadilan agama.¹⁶¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang masa berkabung dalam perkara putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:

¹⁶⁰Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm. 34

¹⁶¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
- b) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.¹⁶²

2. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri.

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi akibat adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

*“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*¹⁶³

Talak yang dimaksud adalah memutuskan hubungan antara suami isteri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama¹⁶⁴. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 dijelaskan bahwa *“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 230 dan 131”*¹⁶⁵

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/TalakTalak#Latar_Belakang/ diakses pada hari rabu 11 November 2020

¹⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak terbagi kedalam beberapa macam, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁶⁶ antara lain, yaitu:

- a) Talak *Raj'i*, dalam pasal 118

“Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali isteri dalam masa iddah”

- b) Talak *Ba'in Sughraa*, dalam pasal 119

“Talak Ba'in Sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah”

- c) Talak *Ba'in Kubraa*, dalam pasal 120

“Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali pernikahan dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnyanya”

- d) Talak *Sunny*, dalam pasal 121

“Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”

- e) Talak *Bid'i*, dalam pasal 122

“Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”

¹⁶⁶*Ibid*, hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu perceraian karena sebab talak atau gugatan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) sampai huruf (h) sebagai berikut:

- a) Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Suami melanggar taklid talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga¹⁶⁷.

¹⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perceraian karena gugatan perceraian adalah perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat (isteri) kepada pengadilan agama, agar ikatan perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan pengadilan agama. Sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, yaitu :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami
- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahu gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.¹⁶⁸

Gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri kepada suami dikenal dengan istilah jalan khuluk, apabila hal ini ditempuh oleh isteri terhadap suaminya, maka berakulah akibat khuluk terhadap keduanya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 161:

*“Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”.*¹⁶⁹

3. Karena Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁷⁰.

¹⁶⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 2002), cet. ke-2, hlm. 92

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembatalan perkawinan berdasarkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28 ayat (1): *“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”*.¹⁷⁰

Perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan agama apabila kedua belah pihak antara suami dan isteri tidak dapat memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya atau salah satu dari kedua belah pihak (suami-isteri) atau keduanya melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 bahwa batalnya perkawinan disebabkan oleh:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari ke empat isterinya dalam iddah talak *raj'i*
- b) Seseorang yang menikah dengan bekas isterinya yang telah di *li'an*nya
- c) Seseorang yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahanya
- d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang

¹⁷⁰ Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga, *Op.cit*, hlm. 111

¹⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang –undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. *Li'an* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pasal-pasal yang berkaitan dengan *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan *li'an* diatur dalam buku I tentang hukum perkawinan bab XVI Putusnya Perkawinan dan bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan sebanyak 5 pasal, yaitu:

- a) Bab XVI Putusnya Perkawinan pasal 125 sampai pasal 128, sebagai berikut:¹⁷²
 - 1) Pasal 125 ketentuan umum tentang putusnya perkawinan, yang berbunyi: "*Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri untuk selama-lamanya*"
 - 2) Pasal 126 ketentuan tentang sebab-sebab terjadinya *li'an*, yang berbunyi: "*Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut*"
 - 3) Pasal 127 tata cara pelaksanaan *li'an* diatur sebagai berikut:
 - (a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "*Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut dusta*"
 - (b) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran

¹⁷²Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), cet. ke-5, hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak benar diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkarang tersebut benar

(c) Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan

(d) Apabila tata cara huruf a tidak di diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi *li'an*

(e) Pasal 128 tentang sahnya *li'an* apabila dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan agama, sebagai berikut: "*Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama*".

b) Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, sebanyak 1 pasal yaitu pasal 162 sebagai berikut:¹⁷³ "*Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah*".

2. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukum *Li'an* Dalam 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu perkara yang menyebabkan putusnya perkawinan yang tidak disebutkan dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah *li'an*. Putusnya perkawinan dengan sebab *li'andiatur* dalam pasal 125 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "*Li'an menyebabkan putusnya*

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan antara suami dan isteri untuk selamanya”. Perkara *li’an* baru sah apabila perkara tersebut dilakukan di sidang pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “*Li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan*”

Perkara *li’an* bukan sekedar menyebabkan putusanya perkawinan sebagaimana dalam pasal 113 dan pasal 38 bahkan putusanya perkawinan karena *li’an* tersebut berlaku untuk selama-lamanya. Perkara *li’an* berakibat kedalam beberapa hal, sebagaimana dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: “*Bilamana li’an terjadi maka perkawinan akan putus selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah*”.¹⁷⁴

a) Putusnya perkawinan untuk selamanya

Yaitu bahwa suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus untuk selama-lamanya dengan sebab *li’an*. Sehingga suami tidak dapat merujuk kembali isterinya yang telah di *li’an* untuk selama-lamanya. Sedangkan isteri yang dapat dirujuk kembali oleh suaminya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

¹⁷⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*
- b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan atau alasan selain zina dan khuluk

Sementara itu bekas isteri yang sudah dijatuhi *li'an* oleh suaminya tidak boleh dirujuk atau tidak boleh dinikahi kembali untuk selamanya, meskipun isteri sudah menikah dengan laki-laki lain, dan bercerai kembali dengan laki-laki tersebut *ba'da dukhul*, telah habis masa iddah nya namun tidak bisa menikah lagi dengan isteri yang sudah di *li'an*, walaupun hal ini tidak ditegaskan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akan tetapi berbeda dengan perkara isteri yang dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya atau talak *ba'in qubra*, isteri boleh dinikahi kembali oleh suami yang mentalaknya tiga kali dengan syarat bahwa isteri telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan isteri tersebut telah habis masa iddah nya. Persoalan ini dijelaskan dalam pasal 70 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b) Nasab anak kepada ibunya

Yaitu suami yang telah *meli'an* isterinya maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Karena suami telah menyangkal anak tersebut dengan *meli'an* isterinya sehingga nasab anak terputus dari ayahnya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 anak yang sah adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau sebab perkawinan yang sah
- 2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang tidaklah terputus nasab dengan ayahnya meskipun terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sedangkan anak yang dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: "*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*"¹⁷⁵

Dengan dinasabkannya anak dari isteri yang di *li'an* oleh suaminya kepada ibunya menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang ber *li'an* adalah perkawinan yang tidak sah sehingga patut untuk diputuskan ikatan perkawinan tersebut untuk selama-lamanya sedangkan anak yang lahir dari kandungan tersebut adalah sama halnya dengan anak yang lahir diluar perkawinan, meskipun tidak ditegaskan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- c) Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah

Pada dasarnya suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian

¹⁷⁵ *Ibid.* hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhl*
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁷⁶

Suami juga mempunyai kewajiban terhadap tanggungan biaya pemeliharaan anak-anaknya meskipun sudah terjadi perceraian antara suami dan isteri, sebagaimana dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut : “ Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁷⁷

Sementara itu dalam perkara putusanya perkawinan karena *li'ansuami* tidak memiliki kewajiban atas semua nafkah terhadap bekas isteri yang di *li'an* maupun kepada anak-anaknya karena *li'an* tidak sama halnya dengan talak.

E. Maqashid Syari'ah

Para ulama sepakat bahwa setiap hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan dari pensyari'atannya yang disebut dengan istilah *maqashid asy-Syari'ah* yaitu tujuan hukum Islam yang ditentukan oleh Allah SWT, tujuan hukum tersebut dijadikan sebagai landasan bagi para mujtahid dalam upaya mengembangkan atau menjawab berbagai persoalan hukum.

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa syari'at Islam datang dengan tujuan untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia baik yang bersifat individu maupun kelompok masyarakat yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan.¹⁷⁸ Sementara itu Ibnul Qayyim al-Jauziyyah (691 H-751 H) berpendapat bahwa sesungguhnya syari'at Islam dibina berdasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.¹⁷⁹

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, kedua kata ini sama-sama memiliki pengertian, antara lain:

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 32

¹⁷⁸ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1999), cet.ke-1, hlm. 54

¹⁷⁹ Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Maqashid

Secara bahasa kata *maqashid* adalah berasal dari bahasa arab yaitu *qashada, yaqshidu, qashdan*, yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).¹⁸⁰ Dengan demikian kata *maqashid* menunjuk kepada makna tentang maksud sesuatu.¹⁸¹ Sementara itu menurut *Ahmad ar-Raysuni* dalam kitabnya yang berjudul *Madkhal ila Maqashid Syari'ah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan dan diarahkan oleh kehendak atau niat saat berkata atau melakukannya.¹⁸²

b) Syari'ah

Secara bahasa syari'ah berarti *al-utbah* (liku-liku, lembah), *al-'atbah* (ambang, pintu, dan tangga), *maurid al-syaribah* (jalan tempat peminum mencari air), dan *at-Thariqah al-Mustaqimah* (jalan yang lurus). Sedangkan menurut istilah adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang yaitu keyakinan (aqidah), perbuatan dan akhlak.¹⁸³

Apabila syari'at dikaitkan dengan metode hukum Islam, maka syari'at disini diartikan sebagai segala aturan Allah yang berkaitan

¹⁸⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidayakarya Agung, 1990), cet.ke-1, hlm. 343

¹⁸¹ Ahmad Bakri Islmail Habib, *Maqashid Syari'ah Islamiyah Tafsiran wa Taf'ilan*, (Makkah : Idarah ad-Da'watu Wata'lim, 2006), cet. ke-1, hlm. 14

¹⁸² Ahmad ar-Raysuni, *Madkhal Ila Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Kalimah, 2010), cet.ke-1, hlm. 7

¹⁸³ Sejarah dan perkembangan Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan amal perbuatan yang harus dipatuhi oleh manusia itu sendiri.¹⁸⁴ Syari'at dalam konteks ini dijabarkan dengan istilah fiqh.

Demikian demikian yang dimaksud dengan maqashid syari'ah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyari'atkan hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹⁸⁵ Sehingga dengan demikian setiap hukum mengandung kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi manusia baik yang bersifat duniawi maupun kemaslahatan yang bersifat ukhrowi. Sebagian ulama memberikan definisi maqashid syari'ah diantaranya Wahbah az-Zuhaili, maqashid syari'ah yaitu tujuan syari'at dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'I pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah terbagi kedalam beberapa bagian berdasarkan pada masing-masing tinjauannya, antara lain:

- a) Ditinjau dari segi objeknya
 - 1) *Al-Maqashid al-'Ammah* (tujuan-tujuan umum) yaitu sesuatu yang dipilih oleh syara' serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syari'at
 - 2) *Al-Maqashid al-Khassah* (tujuan-tujuan khusus) yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh syara' dalam pembahasan tertentu, seperti masalah perkawinan, ekonomi, pidana (jinayat), peradilan, dan amal-amal kebaikan

¹⁸⁴ Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, *op.cit*, hlm. 38

¹⁸⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 1108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Al-Maqashid al-Juz'iyah* yaitu tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syara' dalam penetapan hukum oleh syara' seperti penetapan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu yang menjadi sebab, syarat dan penghalang (*mani'*).¹⁸⁶
- b) Ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap urusan ummat
 - 1) *Ad-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berifat pokok atau mendasar yang harus dipenuhi dalam tatanan kehidupan manusia, apabila hal tersebut tidak terjaga dan tidak terpenuhi dengan baik maka akan terjadi kerusakan dalam tatan kehidupan manusia.¹⁸⁷ Kemaslahatan-kemaslahatan yang harus dijaga dalam *ad-Daruriyyah* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta
 - 2) *Al-Hajiyyah* yaitu segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindarkan *masyaqqah* (kesulitan) dan apabila *hajiyyah* tidak terwujud tidak menimbulkan kerusakan dalam tatan kehidupan manusia, *hajiyyah* berlaku dalam bidang ibadah, mu'amalah, dan jinayah.¹⁸⁸ Seperti misalnya adanya hukuman rukhsah, dibolehkannya berbuka puasa dengan sebab sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan jauh) dalam hukum keluarga dibolehkannya talak untuk menghindarkan kesulitan bagi suami

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 1109

¹⁸⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet.ke-1, hlm. 53

¹⁸⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993), cet.ke-4, hlm. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri. Fungsi *hajjiyyah* adalah sebagai upaya untuk mewujudkan dan perlindungan yang diperlukan dalam rangka melestarikan lima hal pokok dalam *ad-Dharuriyyah*.¹⁸⁹

- 3) *At-Tahsiniyyah* yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan manusia, yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas lima hal pokok dalam *ad-Dharuriyyah* serta hal-hal yang menyangkut dengan *makarim al-akhlaq* (akhlak mulia).¹⁹⁰ Seperti mengerjakan amalan-amalan sunnah, bersedekah, memakai pakaian yang bagus.

3. Maqashid Syari'ah dalam Perkawinan

Jumhur ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan didalamnya, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukrowi.¹⁹¹ Hukum-hukum Islam yang sumber utamanya dari nash-nash al-Qur'an maupun hadist Nabi saw bertujuan untuk mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan.¹⁹²

Sehingga dengan demikian setiap manusia wajib mematuhi perintah Allah swt agar memperoleh maslahah (kebaikan) didalamnya dan meninggalkan semua aturan hukum yang sifatnya larangan agar terhindar dari segala keburukan dan mafsadah (kerusakan).¹⁹³ Berdasarkan pada hal

¹⁸⁹ Ensiklopedi Hukum Islam, *Loc.cit*.

¹⁹⁰ Filsafat Hukum Islam, *Op.cit*, hlm. 192

¹⁹¹ Ensiklopedi Hukum Islam, *loc.cit*.

¹⁹² Falsafah Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 177

¹⁹³ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, maka setiap hukum-hukum syara' tidak terlepas dari adanya tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu¹⁹⁴ yang disebut dengan *maqashid syari'ah* yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadat).

Adapun *maqashid syari'ah* dari hukum perkawinan dalam Islam adalah memelihara keturunan. Tujuan dari memelihara keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia¹⁹⁵. Dalam kajian *maqashid syari'ah* memelihara keturunan dikenal dengan beberapa istilah antara lain yaitu:

- 1) *Nasab*, yaitu istilah yang menunjuk pada garis keturunan keatas antara lain: ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya
- 2) *Nasl*, yaitu istilah yang menunjuk pada garis keturunan ke bawah, antara lain: anak, cucu, dan seterusnya
- 3) *Budh'*, yaitu istilah yang menunjuk pada kelamin perempuan.¹⁹⁶

Istilah yang tepat digunakan dalam konteks memelihara keturunan dalam perkawinan adalah *hifzul an-Nasab* (garis keturunan keatas) dan *hifzul an-Nasl* (garis keturunan kebawah). Akan tetapi dalam *maqashid syari'ah* penyari'atan hukum *li'an* kata yang tepat digunakan adalah *hifzul an-Nasl* karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan generasi keturunan kedepan.

¹⁹⁴ Maqashid Syari'ah, *op.cit*, hlm. 22

¹⁹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Radja, 2018), cet.ke-1, hlm. 40

¹⁹⁶ Achmad Beadie Busyroel Basyar, *Perlindungan Teori Nasab dalam Teori Maqashid Syari'ah*, dalam <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid> diakses pada minggu 13 desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hifzul an-Nasl (memilihara keturunan) adalah merupakan salah satu dari tingkatan *ad-dharuriyyah al-khamsah*.¹⁹⁷ Sementara *Hifzul an-Nasl* dalam tingkatan *ad-dhariyyah al-khamsah*¹⁹⁸ dapat dibedakan dalam tiga sesuatu, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Hifzul an-Nasl* dalam tingkatan *dharuriyyah* yaitu memilihara keturunan yang bersifat mendasar (pokok). Seperti disyari'atkan hukum nikah dan larangan berbuat zina adalah dalam upaya untuk memilihara keturunan dan kehormatan, apabila aturan hukum ini dilanggar seperti misalnya seseorang (laki-laki) mempunyai kemampuan untuk menikah baik secara zahir maupun bathin tetapi tidak melaksanakannya dengan tujuan mengingkari syari'at, melakukan perbuatan zina, menuduh perempuan baik-baik atau isterinya berbuat zina, mengingkari anak yang ada dalam kandungan isterinya, maka semua perkara tersebut mengancam keberlangsungan dan keutuhan keturunan.¹⁹⁹
- 2) *Hifzul an-Nasl* dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu seperti disyari'atkannya mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami, jika hal ini tidak dilakukan akan menyulitkan bagi suami karena dia harus membayar mahar misil. Adapun dalam masalah talak suami akan kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sementara

¹⁹⁷ Ushul Fiqih, Jalan Tentang Memahami Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 216

¹⁹⁸ Ad-Dharuriyyat al-Khamsa adalah kemaslahatan yang mendasar (pokok) yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memilihara agama (*hifzul ad-din*), memilihara nyawa (*hifzul an-Nafs*), memilihara akal (*hifzul al-Aql*), memilihara keturunan (*hifzul an-Nasl*), memilihara harta (*hifzul al-Mal*)

¹⁹⁹ Ushul Fiqih, Jalan Tentang Memahami Hukum Islam, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan rumah tangga sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pernikahan itu sendiri.²⁰⁰

- 3) *Hifzul an-Nasl* dalam tingkatan *tahsiniyat*, yaitu seperti disyari'atkannya khitbah atau meminang, walimah pernikahan, hal ini dilakukan dalam upaya untuk melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak dan tidak akan mengancam keutuhan keturunan.²⁰¹

²⁰⁰ *Ibid.* hlm. 217

²⁰¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

1. Metode

Secara bahasa kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang terdiri dari dua kata yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti, dan *hodos* yang berarti jalan, arah atau cara. Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Arti khususnya adalah cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu.²⁰² Metode juga diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode²⁰³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata metode mempunyai dua arti yaitu :

- a) Cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud
- b) Cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yg ditentukan²⁰⁴.

²⁰²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), cet.k-1, hlm. 7

²⁰³Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), ce.ke-1, hlm.41

²⁰⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), cet.ke-1, hlm. 1022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian

Secara bahasa kata penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris *research* yang terdiri dari dua kata yaitu *re* (kembali) dan *search* (mencari)²⁰⁵. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum²⁰⁶.

Pengertian penelitian secara terminologi dikemukakan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Hill Way, penelitian adalah suatu metode studi yang bersifat hati-hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah tersebut²⁰⁷
- 2) Menurut Winarno Surachmand, penelitian adalah kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru yang bersumber dari primer-primer, dengan tekantujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki²⁰⁸
- 3) Menurut Soetrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah²⁰⁹

²⁰⁵ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), cet.ke-1, hlm. 8

²⁰⁶ Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit*, hlm. 1153

²⁰⁷ *Dasar Metodologi Penelitian, op.cit*, hlm. 9

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menurut Cooper dan Emory, penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.²¹⁰

Dengan demikian yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam upaya mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian guna untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²¹¹ Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu.²¹²

B. Urgensi Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah yang paling penting adalah tentang metode atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian, sehingga metode yang tepat akan melahirkan penelitian yang berkualitas dan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Karena salah satu syarat dari ilmu pengetahuan adalah memiliki objek dan metode ilmiah atau memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek *Ontologis*, yaitu berkenaan dengan apa yang ingin diketahui dari suatu objek penelitian, apa yang difikirkan atau apa yang menjadi masalah²¹³

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), cet.ke-1, hlm. 2

²¹² Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), cet.ke-1 hlm. 41

²¹³ Suryana, *Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), cet.ke-1, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Aspek *Epistimologis*, yaitu berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berfikir ilmiah²¹⁴
- 3) Aspek *Aksiologis*, yaitu berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat dari ilmu. Nilai guna ilmu dapat dilihat dari aspek *positif* dan *normatif*. Aspek *positif* nilai guna ilmu adalah mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan objek studi yang dipelajari. Aspek *normatif* nilai guna ilmu adalah untuk mengadakan berbagai fenomena ke arah yang di inginkan.²¹⁵

C. Metode yang Digunakan Dalam Penelitian

Metode terbagi kedalam beberapa macam pembagian, antara lain sebagai berikut :

1. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada penyelidikan positifis, di mana penelitian dilakukan melalui kajian eksperimental dan data numerik yang dipungut dan dianalisis dengan cara-cara statistik. Melalui penelitian kuantitatif, masalah kajian dinyatakan dalam bentuk hipotetis.²¹⁶ Metode penelitian kuantitatif dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terperinci, yang fokus pada penggunaan data, angka, tabel, grafik, dan diagram dalam menampilkan hasil penelitian yang diperoleh.

²¹⁴*Ibid.*

²¹⁵*Ibid*, hlm. 6

²¹⁶Muhammad Mustari, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : LaksBang Presindo, 2012), cet.ke-1, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis yang berlandaskan pada teori-teori. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.²¹⁷

3. Metode Deskriptif (Mendesripsikan)

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri dan sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.²¹⁸ Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a) Teknik survey
- b) Studi kasus
- c) Studi komparatif
- d) Studi tentang waktu dan gerak
- e) Analisis tingkah laku

²¹⁷Dasar Metodologi Penelitian, *op.cit*, hlm, 28

²¹⁸Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, *op.cit*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Analisis dokumentar²¹⁹

4. Metode Historis (Merekonstruksi)

Metode historis adalah metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif-historis, yuridis dan biografis.²²⁰

5. Metode Verifikasi (Pengujian)

Metode verifikasi adalah merupakan metode yang digunakan untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna untuk menyusun teori dan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi berkembang menjadi *grounded research* yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori.²²¹

6. Metode Eksperimen (Menguji coba)

Metode Eksperimen adalah metode yang dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Metode penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak, sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survey eksplanatory, metode deskriptif dan metode histori.²²²

Diantara beberapa bentuk metode penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis yang berlandaskan pada teori-teori. Yaitu teori-

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori yang berkaitan dengan *li'an* baik yang didapat didalam kajian fiqih keluarga (hukum keluarga Islam) maupun dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian dapat di klasifikasikan²²³ kedalam beberapa kelompok, antara lain yaitu:

1. Jenis penelitian ditinjau dari segi tujuan penelitian

Apabila ditinjau dari segi tujuannya, maka penelitian terbagi kedalam 2 jenis penelitian, yaitu:

a) Penelitian dasar (*Fundamental Research*)

Yaitu penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dasar. Sementara itu menurut D.R Cooper dan C.W Emory (2007) yang dimaksud dengan penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Julia, Brennen (2008) menyatakan bahwa penelitian dasar adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan.²²⁴

Penelitian dasar selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua bagian berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan teori, antara lain yaitu:

²²³ Klasifikasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, klasifikasi diartikan sebagai proses pengelompokkan benda berdasarkan pada ciri-ciri persamaan dan perbedaan.

²²⁴ Etta Mamang Sangaji, dkk. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), ce.ke-1, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Penelitian Deduktif

Yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji (*testing*) hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan²²⁵

2) Penelitian Induktif

Yaitu penelitian yang mempunyai tujuan mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta.²²⁶

b) Penelitian Terapan (*Applied Research*)

Penelitian terapan adalah penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan masalah tertentu.²²⁷

Berdasarkan tinjauan dari segi tujuan penelitian itu sendiri, maka penelitian ini adalah jenis penelitian terapan, yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori-teori tertentu dalam memecahkan masalah-masalah tertentu dengan melakukan pendekatan deduktif dalam rangka untuk menguji aplikasi teori dalam keadaan tertentu.

2. Jenis penelitian ditinjau dari sifat dan jenis data

Berdasarkan pada tinjauan ini, penelitian terbagi kedalam tiga jenis penelitian, yaitu :

a) Penelitian Opini (*Opinion Research*)

Yaitu penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat (responden) data yang diteliti berupa responden secara individu atau kelompok.²²⁸

²²⁵ *Ibid*, hlm. 19

²²⁶ *Ibid*.

²²⁷ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pandangan, persepsi, atau penilaian opini terhadap masalah tertentu yang berupa tanggapan responden terhadap diri responden atau kondisi lingkungan dan perubahan.

b) Penelitian Empiris (*Empirical Research*)

Penelitian empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Penelitian empiris umumnya lebih menekankan pada penyelidikan aspek perilaku terhadap opini.²²⁹

c) Penelitian Arsip (*Archival Research*)

Penelitian arsip adalah penelitian terhadap fakta tertulis atau berupa arsip data. Dokumen arsip yang diteliti berdasarkan sumbernya dari internal atau berasal dari data eksternal, yaitu publikasi data yang diperoleh melalui orang lain.²³⁰

Berdasarkan pada tinjauan sifat dan jenis datanya tersebut, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian arsip, yaitu penelitian terhadap fakta-fakta tertulis seperti fakta dan aturan hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam kitab-kitab fiqih.

3. Jenis penelitian ditinjau dari segi bidang ilmu

Ditinjau dari segi bidang ilmu yang diteliti, maka penelitian meliputi beberapa bidang antara lain yaitu:

²²⁸ *Ibid*, hlm. 20

²²⁹ *Ibid*.

²³⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penelitian bidang pendidikan
- b) Penelitian bidang pertanian
- c) Penelitian bidang hukum
- d) Penelitian bidang ekonomi
- e) Penelitian bidang agama.²³¹

Berdasarkan tinjauan bidang ilmu yang diteliti, maka penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian bidang hukum, yaitu hukum-hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan *li'an*. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu terhadap gejala-gejala, fakta, dan permasalahan-permasalahan hukum.²³²

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa metode penelitian hukum terbagi tiga sesuatu, yaitu:

- a) Metode *Ideologis*, yaitu apabila hukum dilihat dan diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.²³³ Metode ini akan menguji hukum yang berorientasi pada terwujudnya nilai-nilai tertentu
- b) Metode *Analisis Normatif*, yaitu apabila hukum dilihat dan diartikan sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak.²³⁴
- c) Metode *Sosiologis*, yaitu apabila hukum dilihat, diartikan dan difahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat.²³⁵ Metode ini mengaitkan

²³¹Cholid Narbuko, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), cet.ke-12, hlm. 41

²³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Perkasa, 2012), cet.ke-12, hlm. 38

²³³*Ibid*, hlm. 67

²³⁴*Ibid*, hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum kepada usaha-usaha dan upaya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri serta dapat memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat.

4. Jenis penelitian ditinjau dari segi tempat penelitian

Penelitian yang ditinjau dari segi tempat penelitian, terbagi kedalam tiga jenis penelitian, antara lain yaitu:

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu

c) Penelitian Laboratorium (*Laboratory Research*)

Yaitu penelitian yang dilaksanakan ditempat tertentu seperti laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan.²³⁶

Berdasarkan tinjauan tempat penelitian tersebut, maka penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan riset kepustakaan terhadap sumber-sumber tertulis seperti teori, kitab, buku-buku, tulisan, jurnal, karya-karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Upaya tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan Mastuhu tentang penelitian kepustakaan, bahwa penelitian pustaka merupakan

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, *op.cit*, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.²³⁷ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.

5. Jenis penelitian yang ditinjau dari segi tingkat eksplanasinya

Pengertian penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.²³⁸ Dalam hal ini penelitian terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu:

a) Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain²³⁹

b) Penelitian Komparatif

Yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Disinivariabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda²⁴⁰

²³⁷ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama perspektif teoritis dan praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), cet.ke-1, hlm. 199

²³⁸ Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, *Loc.cit*

²³⁹ Surahman, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016), cet.ke-1, hlm. 8

²⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Penelitian Asosiatif

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif merupakan penelitian dengan tingkatan tertinggi dibanding penelitian deskriptif dan komparatif.²⁴¹

Berdasarkan tinjauan penelitian dari segi eksplanasi tersebut, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel yang ada dalam penelitian.

6. Jenis Penelitian ditinjau dari segi pengukuran dan analisis data

Penelitian apabila ditinjau dari segi pengukuran dan analisis data, terbagi kedalam dua bentuk jenis penelitian, antara lain:

a) Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan analisis dengan teknis statistik.

b) Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik tanpa menggunakan teknik statistik.

Maka berdasarkan pada tinjauan dari segi pengukuran dan analisis data tersebut, penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, dimana analisis datanya tanpa menggunakan teknik statistik.

²⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini adalah Putusnya Perkawinan Karena *Li'an* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian untuk mendapatkan data yang akurat, valid dan mendalam ,maka perlu untuk mengulas dan mengkaji sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini secara umum ada dua sumberdata, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang asli.²⁴² Data primer juga disebut sebagai data utama atau data asli.Dengan demikian, adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, yaitu berupa Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²⁴³ Data sekunder juga disebut sebagai data pendukung. Dalam perspektif penelitian kepustaaan maka data sekundernya adalah buku-buku yang secara tidak langsung membahas persoalan tersebut secara khusus. Maka data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqih

²⁴²Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, *op.cit*, hlm. 44

²⁴³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data tersier adalah merupakan data penunjang dari data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini adalah kamus, direktori, dan ensiklopedi dan buku-buku yang tidak secara khusus membahas permasalahan dalam penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian adalah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁴⁴ Kualitas data sangat ditentukan oleh teknik pengumpulan datanya, karena teknik pengumpulan data adalah merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian.²⁴⁵ Jika alat ukur pengumpulan datanya cukup valid (shahih), reliabel (keandalan) dan obyektif maka datanya juga akan valid, reliabel dan obyektif.²⁴⁶ Secara umum baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan lima cara, yaitu :

1) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah teknik pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan dicatat

²⁴⁴ *Ibid*, hlm. 47

²⁴⁵ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alberta Bandung, 2013), cet.ke-5, hlm. 290

²⁴⁶ *Metodologi Penelitian, op.cit*, hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah merupakan kegiatan tentang bagaimana data yang telah dikumpulkan itu diolah, diklasifikasi, dibedakan, dan kemudian dipersiapkan untuk dipaparkan.²⁴⁷ Pada dasarnya analisis data dibagi menjadi dua macam, antara lain yaitu:

1. Analisis Kuantitatif

Yaitu teknik analisis yang menggunakan data statistik yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar.²⁴⁸ Analisis data kuantitatif dilakukan dengan dua cara yaitu analisis deduktif dan analisis inferensial.

2. Analisis Kualitatif

Menurut Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴⁹ Analisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa metode analisis yaitu induktif, interaktif, grounded theory, wacana, dan semiotika.²⁵⁰

Adapun dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif induktif, dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang

²⁴⁷ Pengantar Metode Penelitian, *op.cit*, hlm. 67

²⁴⁸ Cholis Marbuko, *op.cit*, hlm. 64

²⁴⁹ Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012), cet.ke-1, hlm. 145

²⁵⁰ Muhammad Mustari, dkk, *op.cit*, hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan fokus penelitian serta menggunakan analisis terhadap konten yaitu isi daripada Kompilasi Hukum Islam (KHI. Sementara itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jalur analisis data, antara lain yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, merangkum hal-hal yang pokok, dan penyederhanaan data

2. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

3. Menarik kesimpulan / Verifikasi

Yaitu merupakan bagian akhir yang dilakukan peneliti dalam proses analisis data. Dalam proses ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

Peneliti juga melakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut dengan cara melakukan tinjauan ulang terhadap data-data kepustakaan yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan serta mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan karena *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 125. Sedangkan turunan dari pasal 125 tersebut adalah pasal 162 yang menjelaskan akibat hukum setelah putusnya perkawinan karena *li'an* yaitu:
 - a) Putusnya perkawinan untuk selamanya
 - b) Anak yang dikandung di nisbatkan kepada ibunya
 - c) Suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah
2. Pemberlakuan akibat hukum dari pada *li'an* sebagaimana diatur dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan demi terwujudnya maqashid syari'ah dalam suatu perkawinan yaitu memelihara keturunan. Perlindungan yang dimaksud dalam pemberlakuan pasal 162 akibat hukum *li'an* adalah perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan suami, perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan isteri dan perlindungan yang berkaitan dengan status dan hak-hak terhadap seorang anak
3. Terdapat perbedaan akibat hukum *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan hukum keluarga Islam (Fiqih), klasifikasi perbedaan itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain, yaitu : Dalam hukum keluarga Islam (fiqih) akibat dari hukum *li'an* tidak hanya mencakup tiga hal yang berkaitan dengan putusannya ikatan perkawinan, hubungan nasab anak dan tidak ada kewajiban nafkah, tetapi akibat hukum *li'an* mencakup perkara yang berkaitan dengan penegasan tidak adanya rujuk bagi suami isteri untuk selamanya, tidak adanya hak saling mewarisi, tidak boleh menuduh zina bagi perempuan yang sudah di *li'an* oleh suaminya dan penegasan berlakunya hukuman *hadd* bagi suami isteri jika mereka mengingkari *li'an*.

B. Saran

Dalam hal ini, penulis mengajukan rekomendasi berupa saran-saran kepada para pembaca atau bagi praktisi hukum Islam yang mengkaji tentang hukum-hukum Islam khususnya hukum keluarga yang berkaitan dengan *li'an*, antara lain:

1. Hendaknya masyarakat muslim khususnya bagi suami isteri agar mengetahui perkara *li'an* tersebut sebagai salah satu hal yang menyebabkan putusannya perkawinan untuk selama-lamanya serta akibat-akibat lain yang berlaku didalamnya. Karena *li'an* bukanlah talaq, terutama dalam konteks kekinian, zaman teknologi dan serba digital, pemahaman dan pengetahuan tentang *li'an* menjadi sangat penting agar tidak terjadi tuduhan-tuduhan zina terhadap isteri
2. Bagi praktisi hukum Islam dan lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung RI) bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga

negara yang telah merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Surat Keputusan Bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam, agar membuat aturan tambahan berkaitan dengan penegasan pemberlakuan akibat hukum *li'an* sebagaimana dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengingat *li'an* itu sangat penting sekali terutama dalam kontek kekinian, agar tidak terjadi saling tuduh menuduh dengan tuduhan zina antara suami dan isteri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azim bin Badawi al-Khalafi, *Alwajiz (Ensiklopedi Fiqih Islam dalam al-Qur'an dan Ash-Sunnah As-Shahihah)* alih bahasa oleh Ma'ruf Abdul Jalil, (Jakarta : Pustaka ash-Sunnah, 2006), cet. ke-2
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), cet.ke-7
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, alih bahasa oleh Abdul Majid Khom, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), cet.ke-4
- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, alih bahasa oleh M.Misbah, (Jakarta : Rabbani Press, 2008), cet. ke-1
- Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri', Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), cet.ke-1,
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), cet. ke-8
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Fajar Offset, 2004), cet.ke-1
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2002), cet.ke-2
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 2002), cet. ke-2
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor : Pustaka Imam asy- Syafi'i, 2004), cet.ke-1
- Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Ekatama Media, 2018), cet.ke-1
- Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Muqayyis al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), cet.ke-1, Jilid V
- Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Radja, 2018), cet.ke-1
- Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), cet.ke-1
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrn Abu Bakar, (Semarang; Karya Toha Putra, 1993), cet.ke-3, juz ke-18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet.ke-1

Ahmad Bakri Islmail Habib, *Maqashid Syari'ah Islamiyah Tafsiran wa Taf'ilan*, (Makkah : Idarah ad-Da'watu Wata'lim, 2006), cet. ke-1

Ahmad ar-Raysuni, *Madkhal Ila Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Kalimah, 2010), cet.ke-1

A. Khisni, *Fiqh Kontemporer, Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer*, (Semarang : Unissula Press, 2017), cet. ke-1

_____, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula, 2011), cet.ke-1

Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqih* (Depok, Keira Publishing, 2017), cet.ke-1

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut, Dar el-Fikr, 2003), cet.ke-1, juz ke-2

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Jakarta Putra Grafika, 2009), cet. ke-3

Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqih, Jalan Tentang Memahami Hukum Islam*, (Jakarta : Penerbit Amza, 2019), cet. ke-1

Andi Syamsu Alam, Dkk. *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), cet.ke-1

Aulia Muthia, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), cet. ke-1

Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar baru van Hoeve, 2005), jilid ke-4

Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), cet. ke-1

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Agung, 2005), cet.ke-1

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Perkasa, 2012), cet.ke-12

Cholid Narbuko, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), cet.ke-12

Cholil Nafis, *Fiqh Keluarga, Menuju Keluarga Syakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014), cet.ke-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1996), cet.ke-1

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Kathoda, 2005), cet.ke-1

_____, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), cet. ke- 1

Etta Mamang Sangaji, dkk. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), ce.ke-1

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), cet.ke-1

Hartomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), cet.ke-1

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), ce.ke-1

Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), cet.ke-1

Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A.Abdurrahman dkk, (Semarang, CV. Asy Syifa', 1990), cet. ke-1

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'In, Panduan Hukum Islam*, alih bahasa oleh Asep Saefullah FM, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), cet.ke-1, jilid 4

Ifah Muzammil, *Fiqih Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart Printing, 2019), cet. ke-1

Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2000), cet. ke-1

Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), cet. ke-1

Kosim, *Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2019), cet.ke-1

M.Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Bandung : Angkasa, 1985), cet. ke- 3

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), cet.ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahkamah Konstitusi, *KUHP dan KUHP Edisi Lengkap*, (Yogyakarta, Panama Publishing, 2012), cet. ke-1

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015), cet.ke-5

Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama perspektif teoritis dan praktis*, (Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000), cet.ke-1

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidayakarya Agung, 1990), cet.ke-1

Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah*, (Palembang : CV. Amanah, 2020), cet.ke-1

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pranamedia Group, 2016), cet.ke-1

Muhammad Ali al-Hasan, *Tafsir Surat an-Nur*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), cet.ke-2

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo persada, 2008), cet.ke-2

Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab : Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari*, alih bahasa oleh Ibnu Alwi Bafaqih, (Jakarta : Penerbit Cahaya, 2007), cet.ke-1

Muhammad Mustari, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : LaksBang Presindo, 2012), cet.ke-1

Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2014), cet.ke-2

Muhammad Fu'ad Abd Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazhi al-Qur'anil Kariim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), cet.ke-1

Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris*, (Medan : CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2020), cet.ke-1

MA Tihami dkk, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), cet.ke-2

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Hamzah, 2013), cet.ke-1

Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan, Perdana Publishing, 2015), cet.ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peter Salim Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 2002), cet. ke-3

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), cet.k-1

Redaksi Simabua Mitra Usaha, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Medan : Duta Karya Medan, 1995), cet. ke-1

Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alberta Bandung, 2013), cet.ke-5

Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia, Fiqih dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), cet.ke-1

Satria Efendi, *Usuhul Fiqh*, (Jakarta : Pernada Media Group, 2014), cet.ke-5

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Muhktashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Abdul Majid, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet.ke-1

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa oleh Abdul Ghofur, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011), cet.ke-7

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh Abdul Ghofur,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), cet. ke-36

Syaikh Saleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas al-Fiqhiyyah*, alih bahasa oleh Sufyan bin Fuad Baswedan, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013), cet. ke-1, jilid 3

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam Bab 6*, alih bahasa oleh Eko Haryanto Abu Ziyad, (Jakarta : Islam House, 2012), cet. ke-1

Syamruddin Nasution, *Konflik-Konflik Politik dalam Sejarah Islam*, (Pekanbaru : Asa Riau, 2017), cet.ke-1

Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Karya Anda, 1994), cet.ke-1

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet.ke-1

Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012), cet.ke-1

Sigit Sapto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Itizam, 2016), cet.ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), cet.ke-1

Surahman, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016), cet.ke-1

Suryana, *Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), cet.ke-1

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007), cet. ke-2

Tim Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1

Tim Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), cet.ke-3

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993), cet.ke-4

Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2011), cet.ke-11

Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), cet. ke-5

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), cet.ke-1

Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), cet.ke-1

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-10

Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok : Gramata Publishing, 2010), cet.ke-1

Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1999), cet.ke-1

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2006), cet.ke-1



مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Abdul Ghoni

21790215616 : دفتر القيد
Male : الجنس
November 22, 1989: المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

47 : الاستماع
46 : القواعد
47 : القراءة
467 : النتيجة

مستعملة حتى : November 23, 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



محى الدين شكرى الما جيتير
رئيس مركز ترقية اللغة



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT



This is to certify that

Name : Abdul Ghoni
ID Number : 21790215616
Date of Birth : November 22 , 1989
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50
Structure & Written Expressions : 47
Reading Comprehension : 54
Overall Score : 503

Expired Date : November 23, 2022



The Committee of Language Development Center
CLDC
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003



1. Ha
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
1.	10/10/2020	Judul tesis	3/5	
2.	16/11/2020	Bab I	3/5	
3.	-	Bab II	3/5	
4.	20/12/2020	Bab III	3/5	
5.	-	Bab IV	3/5	
6.	20/1/2021	Acc. tesis	3/5	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 30 Januari 2021

Pembimbing I / Promotor *

Dr. Zulfahri, M.Pd.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor *	Keterangan
1.	14/10/2020	Bab I	3/5	
2.	-	Bab II	3/5	
3.	10/12/2020	Bab III	3/5	
4.	21/1/2021	Bab IV	3/5	
5.	-	Bab V	3/5	
6.	19/6/2021	Acc. tesis	3/5	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 14/6 2021

Pembimbing I / Co Promotor *

Dr. Zulfahri, M.Pd.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ABDUL GHANI
 NIM : 21790215616
 PROGRAM : PASCASARJANA
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	03/02/2021	Kepemimpinan Firaun		
2		Dalam Al-Qur'an		
3				
4	03/02/2021	Konsep Ikhlas Dalam		
5		Al-Qur'an (Study Analisis		
6		Penting Ibadah Qur'an		
7		Dalam kehidupan sosial		
8		menurut Sayyid Qutub		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ABDUL GHONI
NIM : 21790215616
PROGRAM : PASCA SARJANA
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI : -

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	19-NOV-2019	Perlindungan Terhadap anak dari pengaruh pornografi pada pasal 15	21	
2	19-NOV-2019 Selasa	Undang-undang no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditinjau menurut		
3	19-NOV-2019 Selasa	hukum Islam.		
4	19-NOV-2019 Selasa	lhdad wanita yang ditinggalkan oleh suami pada pasal 170 KHI		
5	19-NOV-2019 Selasa	ditinjau menurut Maqashid Syariah		
6	19-NOV-2019 Selasa	kedudukan namak dalam masyarakat adat Nagari Kamamudik menurut		
7	-	Perspektif hukum Islam analisis terhadap pergeseran kewenangan		
8	-	Paman sebagai hakim dalam hukum keluarga		
9	19-NOV-2019 Selasa	Narkah Biaya Pengobatan		
10	-	Pengobatan istri menurut		
11	-	Imam Al-Nawawi (676 H) dan		
12	-	Imam Al-Syaukani (1250 H)		
13				
14				
15				

Pekanbaru, 19-NOV-2019
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Abdul Gholami
NIM : 01790215616
PROGRAM : Pascasarjana
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF-SEKRETARIS	KET
1	28/6/2021	Zuhud dalam perspektif		
2		Al-'Aulsi (Study Analisis		
3		Perhadap Tafsir Ruh		
4		Al-Ma'ani fi Tafsir		
5		Al-Bur'an Al-Adzim wa		
6		Al-Mats'ani)		
7				
8	28/6/2021	Zurriyyat dalam		
9		Al-Bur'an		
10				
11	28/6/2021	Status nafkah keluarga		
12		Ketika suami dalam		
13		keadaan sakit menurut		
14		Pendapat Imam Syafr'i		
15		dan komposisi Hukum Islam		

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama	: Abdul Ghoni
Tempat/Tanggal Lahir	: Gema, 22 November 1989
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat Rumah	: Jl. Rawasari No. 25 Tangkerang Selatan
No. Telp/Hp	: 081378175221
 NAMA ORANG TUA	
A. Ayah	: Buyung
B. Ibu	: Jamalis
NAMA ISTERI	: Yussy Erni, S.Ag
 RIWAYAT PENDIDIKAN	
SDN	: 001 Desa Gema (2004)
Wustha	: PP Syekh Burhanuddin Kuntu (2008)
Aliyah	: PP Syekh Burhanuddin Kuntu (2011)
Sarjana (S1)	: UIN Suska Riau (2016)
Pascasarjana (S2)	: UIN Suska Riau (2021)
 PENGALAMAN ORGANISASI	
1. Ketua Himpunan Alumni Pesantren Kuntu-Pekanbaru (2014-2017)	
2. Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu (2018-2021)	